

## **BAB IV**

### **AURI DAN PERISTIWA G-30-S**

Perkembangan peta politik Indonesia tidak pernah lepas dari dialektika kepentingan politik, dimana Presiden Sukarno menjadi tokoh yang dibutuhkan. Angkatan Darat membutuhkan Sukarno dalam menghadapi Demokrasi Parlementer, sedangkan PKI (serta PNI) membutuhkan Sukarno untuk melindungi kepentingan politik mereka. Berlakunya secara efektif Dekrit 5 Juli 1959, menandai dimulainya Demokrasi Terpimpin dengan berlakunya kembali UUD 45 sebagai dasar konstitusi negara. Dengan demikian partisipasi militer, yang dalam demokrasi parlementer dibatasi, mendapatkan ruang dalam UUD 45 lewat celah golongan fungsional.

Dalam pandangan Sukarno, angkatan Darat yang memiliki sifat anti-komunis, merupakan suatu unsur penghambat bagi langkah presiden menjalankan politik Nasakomnya yang berupaya mengakomodasi kepentingan politik komunis. Sehingga presiden seringkali mengingatkan agar para militer tidak bersifat komunistophobia. Presiden juga berusaha memindahkan perwira yang anti komunis dari jabatan komando kepada jabatan yang lebih bersifat staf administrasi, seperti yang dialami AH Nasution.

Pada pertengahan 1964, kondisi perpolitikan nasional semakin diliputi perasaan saling mencurigai. Penemuan dokumen rencana pemberontakan PKI oleh Partai Murba, rencana pembentukan Angkatan Kelima serta penemuan Dokumen Gilchrist yang isinya menjelaskan keberadaan operasi rahasia Nekolim untuk

menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno merupakan berbagai macam persoalan yang memanaskan suhu politik nasional.

Penemuan Dokumen Gilchrist merupakan persoalan terpenting, bahkan dianggap sebagai faktor pemicu terjadinya peristiwa G-30-S pada 1 Oktober 1965. Dalam dokumen tersebut, tercantum kata *our local army friends* yang akan membantu operasi Neokolim menjatuhkan kekuasaan presiden. Kata-kata *our local army friends* ditafsirkan PKI sebagai kelompok Dewan Jenderal AD. Menanggapi tuduhan PKI, pihak AD melalui Jenderal Ahmad Yani menyatakan bahwa tidak ada Dewan Jenderal yang bersifat politik dan berencana merebut kekuasaan dari tangan presiden. Dewan Jenderal yang ada dalam AD hanya berfungsi sebagai dewan musyawarah dalam hal administratif yaitu pengangkatan pangkat perwira tinggi.<sup>1</sup>

Memasuki tahun 1965, kesehatan Presiden Sukarno mulai memburuk. Ketika menghadiri suatu acara pertemuan di tanggal 15 Agustus, presiden mendadak jatuh sakit. Melihat merosotnya kesehatan presiden, Ketua Central Comitte (CC) PKI, D.N Aidit, kemudian mendatangkan Tim Dokter RRC untuk melakukan pemeriksaan kesehatan presiden. Dalam pemeriksaan tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa presiden mengalami gangguan ginjal. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama, presiden diperkirakan akan lumpuh atau bahkan meninggal dunia.

Dalam komplikasi latar belakang di atas, pada 1 Oktober 1965 hadir satu gerakan yang mengatas-namakan keselamatan presiden yaitu Gerakan 30 September

---

<sup>1</sup> Kesaksian Sri Mulyono Herlambang: dalam *Dokumen G-30-S dihadapan Mahmilub 3 di Jakarta (Perkara Dr. Subandrio)*, (Pusat Pendidikan Kehakiman AD, Djakarta:1966), hal 118. Selanjutnya disebut Mahmilub Dr. Subandrio.

(G-30-S) yang melakukan pembunuhan terhadap tujuh perwira AD di Jakarta dan dua perwira AD di Yogyakarta. Ironisnya kelak, hasil peristiwa G-30-S justru meruntuhkan Presiden Sukarno dari tampuk kekuasaannya.

#### 4.1 Peristiwa G-30-S

Sampai sekarang, peristiwa G-30-S masih menjadi pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh penulis biografi politik Presiden Sukarno, J.D. Legge, bahwa “setiap penelitian mengenai peristiwa ini tampaknya hanya akan lebih banyak melahirkan pertanyaan, ketimbang jawaban”.<sup>2</sup> Adapun pelaku aktif dalam peristiwa G-30-S berjumlah enam orang, meliputi: Letnan Kolonel Untung (Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa), Kolonel Latief (Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti Kodam V Jaya), Sjam Kamaruzzaman (Biro khusus PKI), Pono (Staf CDB PKI Jawa-Tengah), Mayor Udara Soejono (Komandan Resimen Pertahanan Pangkalan AURI) dan Brigadir Jenderal Supardjo (Komandan Tempur Kostrad di Kalimantan Barat).<sup>3</sup>

Diantara mereka, mengaku baru saling mengenal ketika melakukan pertemuan pertama di rumah Kapten (AD) Wahyudi pada tanggal 17 Agustus

---

<sup>2</sup> J.D Legge, *Sukarno: Biografi Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hal 450-451.

<sup>3</sup> Diantara empat orang militer, pangkat tertinggi adalah Brigadir Jenderal yaitu Supardjo, tiga orang lainnya adalah perwira menengah berpangkat antara Mayor dan Letnan Kolonel. Keberadaan Supardjo dengan pangkat Brigjen yang dalam G-30-S berada di bawah kedudukan Untung yang Letkol, adalah suatu hal yang dinilai John Roosa keanehan. Selain itu, Supardjo juga tidak pernah mengikuti rapat-rapat persiapan kelompok G-30-S dan hanya terlibat dalam G-30-S pada 1 hingga 3 Oktober 1965 saat aksi berlangsung. Lihat John Roosa, *Dalih Pembantaian Masal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hal.124

1965, yang dihadiri nama-nama di atas plus Wahyudi minus Brigjen Supardjo.<sup>4</sup> Selanjutnya kelompok ini mengadakan pertemuan kembali sebanyak tujuh kali yang isinya adalah penyamaan pandangan politik berkisar situasi nasional, sakitnya presiden, pengamanan jalannya revolusi dan pemimpin besar revolusi serta adanya rencana kegiatan kudeta Dewan Jenderal terhadap kekuasaan presiden.<sup>5</sup> Pada akhirnya kelompok ini memutuskan diperlukannya suatu usaha militer untuk menggagalkan gerakan Dewan Jenderal.

Pertemuan akhir yang diadakan pada tanggal 29 September pukul 10.00 pagi, diakhiri dengan *briefing* Kolonel Latief di Desa Lubang Buaya dengan para pemimpin kesatuan gerakan. Latief memberitahukan hari operasi adalah 1 Oktober 1965 dan jam operasi adalah pukul 04.00 dinihari. Setelah itu, Kapten Suradi melanjutkan *briefing* mengenai sektor-sektor dalam ibukota dan kekuatan bersenjata yang tersedia disetiap sektor, dilanjutkan *briefing* Letnan I Dul Arief mengenai pembagian pasukan pasopati, dan terakhir Soejono memberitahu mengenai nama-nama sandi dan simbol yang digunakan dalam gerakan.

Pada pukul 02.30 dinihari 1 Oktober 1965, pasukan penculik yang bersandi Pasopati, pimpinan Letnan I Dul Arief bersiap melakukan penculikan terhadap para Jenderal yang terdiri dari Jenderal A.H Nasution (Menko

---

<sup>4</sup> Kesaksian Wahyudi (Kapten AD) dalam *Dokumen G-30-S dihadapan Mahmilub 2 di Jakarta (Perkara Untung)*, (Pusat Pendidikan Kehakiman AD, Djakarta:1966). hal 77-80. Selanjutnya disebut Mahmilub Untung.

<sup>5</sup> Kesaksian Wahyudi dan Soejono dalam Mahmilub Untung, hal 77 dan 90. Terbukti isu Dewan Jenderal adalah keliru, karena saat penculikan anggota Dewan Jenderal, mereka dapat dengan mudah diamankan tanpa penjagaan. Hal ini merupakan keanehan bagi anggota kelompok aksi yang akan melancarkan kudeta.

Hankam/Kasab), Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Suprpto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Haryono MT (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad) dan Brigjen Sutoyo (Oditur Jenderal AD) untuk diserahkan kepada presiden.<sup>6</sup>

Operasi G-30-S kemudian berhasil menculik dan kemudian membunuh enam sasaran yang tertera dalam daftar, sementara Jenderal A.H Nasution berhasil meloloskan diri. Tiga orang jenderal ditembak mati ditempat, sedangkan tiga jenderal lain dan satu orang ajudan Nasution berhasil dibawa ke Desa Lubang Buaya dan kemudian dibunuh. Mayat korban G-30-S kemudian dikubur dalam sebuah sumur tua yang ditimbun tanah dan sampah daun-daunan kering.

Bersamaan dengan operasi penculikan para jenderal, G-30-S melakukan penguasaan tempat-tempat strategis di Ibukota Jakarta. Pada pukul 02.00 dinihari anggota Yon 530 bergerak dengan lima belas truk AURI untuk menduduki daerah sekitar Istana Merdeka. Pasukan ini ditempatkan sisi selatan Medan Merdeka. Sebelumnya Yon 454 telah berhasil menduduki sisi utara yaitu depan Istana Merdeka. Kekuatan militer ini juga menduduki Pos Telekomunikasi di Medan Merdeka Selatan dan RRI di Medan Merdeka Barat.

Tepat pukul 07.20 WIB tanggal 1 Oktober 1965, RRI menyiarkan pengumuman tentang adanya *Gerakan 30 September* di bawah komandan Letkol Untung, Komandan Batalyon I Resimen Tjkrabirawa. Komando G-30-S

---

<sup>6</sup> Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan G-30-S/PKI di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal. 14. Lihat juga <http://www.sejarah TNI.mil.id/index.php?cid=1973>.

menyatakan bahwa gerakan tersebut semata-mata gerakan internal AD terhadap Dewan Jenderal, yang anggota-anggotanya telah ditangkap, sedangkan Presiden Sukarno dalam keadaan selamat.<sup>7</sup> Pada pukul 13.00 WIB, Komando G-30-S mengeluarkan Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Selanjutnya G-30-S menyiarkan dua buah keputusan penting, yaitu Keputusan No.1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia dan Keputusan No. 2 tentang penurunan dan kenaikan pangkat.<sup>8</sup>

Setelah menerima kabar penculikan para jenderal melalui laporan berbagai koleganya pada pagi 1 Oktober, Mayjen Soeharto menuju Markas Kostrad di Medan Merdeka Utara.<sup>9</sup> Soeharto kemudian membicarakan situasi Jakarta dengan Pangdam V Jaya, Mayjen Umar Wirahadikusumah, serta melakukan koordinasi dengan jajaran perwira militer. Pada siang harinya, Soeharto memutuskan bahwa G-30-S adalah tindakan makar, AURI mendukung G-30-S serta Yon 454 dan 530 yang berada di area Medan Merdeka ikut terlibat dalam gerakan tersebut.

---

<sup>7</sup> *Siaran RRI* pada 1 Oktober 1965.

<sup>8</sup> Disamping komandan dan wakil komandan G-30-S, anggota Dewan Revolusi Indonesia berjumlah 45 orang, seperti nama-nama Mayjen Basuki Rachmat, Mayjen Umar Wirahadikusumah, Brigjen Amir Machmud, Fatah Jasin dan K.H.Siradjuddin Abbas. Untuk daftar lengkapnya lihat lampiran 1. Munculnya nama-nama orang komunis dijadikan alasan keterlibatan mereka, sedangkan adanya nama non-komunis hanya dianggap sebagai kelicikan orang komunis. Logika inilah yang menyebabkan tidak “diseretnya” seluruh nama-nama yang ada dalam daftar ke hadapan Mahmilub.

<sup>9</sup> Sejak dinihari pasukan G-30-S menguasai daerah sekitar Istana, RRI dan Monumen Nasional, tetapi pasukan tersebut tidak ikut menguasai Markas Kostrad yang letaknya masih berada dalam satu *regio*. Lebih lanjut lihat Wertheim, *Suharto and the Untung Coup-the Missink Link*, *Journal of Contemporary Asia*, Vol 1 no.2, Winter 1970.

Mayjen Soeharto yang kemudian mengambil-alih pimpinan AD,<sup>10</sup> berusaha membujuk pasukan Yon 530 dan Yon 454 yang berada di sekitar Medan Merdeka untuk segera menyerahkan diri. Yon 530 akhirnya menyerah dan bergabung ke Markas Kostrad, sedangkan Yon 454 bertahan hingga malam hari dan kemudian mengundurkan diri ke PAU Halim untuk menghadap presiden. Pada malam harinya, pasukan RPKAD tanpa melalui pertempuran berarti berhasil menguasai RRI dan Kantor Telekomunikasi. Kostrad juga membuat keputusan bahwa setiap surat bernada politik yang akan disiarkan RRI harus terlebih dahulu dilaporkan dan meminta persetujuan Dinas Penerangan AD (Dispenad). Pasukan Yon 454 yang mundur ke PAU Halim, kembali berhadapan dengan Pasukan Raiders (Para) 328/Kujang pada pukul 07.00 pagi. Siang harinya pasukan ini akhirnya menyerahkan diri.

Setelah berhasil menghancurkan kekuatan militer G-30-S di Jakarta, Soeharto mulai mengembangkan teorinya tentang keberadaan PKI sebagai pelaku utama G-30-S. Harian milik Angkatan Darat, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, merupakan alat kampanye AD untuk memberi informasi keterlibatan PKI dalam aksi G-30-S. Isu keterlibatan PKI ternyata cukup efektif dalam upaya menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat. Dalam

---

<sup>10</sup> Dalam kebiasaan AD, apabila Men/Pangad berhalangan hadir dalam suatu acara maka yang menggantikannya adalah Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto. Sebagai contoh, saat Men/Pangad Yani sedang melakukan misi ke luar negeri, maka Soeharto yang menggantikan Yani sebagai pimpinan AD. Sukarno sendiri mengangkat Mayjen Pranoto sebagai Men/Pangad carateker, tetapi pada akhirnya Sukarno mengakui kepemimpinan Mayjen Soeharto pada 1 November 1965 yang berlaku surut sejak 1 Oktober 1965. Lihat Keputusan No. 142/KOTI/1965.

waktu relatif singkat, gerakan militer Soeharto mendapat dukungan masyarakat sipil dengan adanya aksi-aksi demonstrasi mengutuk PKI. Nahdlatul Ulama (NU) pada 5 Oktober 1965 dan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) pada tanggal 8 Oktober 1965 melakukan aksi demonstrasi menuntut pembubaran PKI. Aksi penghancuran G-30-S yang diarahkan kepada PKI terus menerus dilakukan militer maupun komunitas sipil hingga tahun 1967, dan bahkan mengarah kepada tindakan pembunuhan anggota dan kader-kader PKI. Robert Cribb berdasarkan pemaparan perkiraan dan penelitian beberapa peneliti, menyebutkan bahwa anggota PKI yang dibunuh berkisar antara jumlah 78.000 hingga dua juta jiwa.<sup>11</sup>

Peristiwa G-30-S, kemudian melahirkan beragam interpretasi mengenai siapa yang menjadi dalang dalam peristiwa tersebut. Sampai saat ini setidaknya ada enam teori pelaku G-30-S, yakni teori: PKI, AD, Sukarno, Suharto, CIA serta kombinasi gerakan PKI-AD-CIA.

Teori yang menyebutkan PKI berada dibalik peristiwa tersebut, disampaikan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Mereka menguraikan keterlibatan PKI lewat beberapa fakta. Pertama, *intensnya* Sjam dan Pono menghadiri rapat-rapat *pra* G-30-S. Kedua, adanya pelatihan kader PKI di bawah pengawasan Mayor (Udara) Soejono di Desa Lubang Buaya yang kelak beberapa komponen pelatihan turut serta dalam aksi G-30-S. Serta ketiga, kehadiran D.N

---

<sup>11</sup> Robert Cribb (ed), *The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2004), hal. 23-24.

Audit di Halim pada 1 Oktober 1965. Dari ketiga fakta ini ditarik kesimpulan, PKI menjadi aktor utama G-30-S.<sup>12</sup> Keterlibatan anggota ABRI dalam G-30-S, disebabkan keberhasilan penyusupan biro khusus PKI. Letkol Untung misalnya, diduga merupakan salah seorang perwira yang ikut terlibat dalam peristiwa Madiun serta merupakan anak didik Alimin, tokoh PKI.<sup>13</sup>

Teori kedua yang disusun oleh Benedict Anderson dan Mc Vey menyebutkan G-30-S adalah konflik internal AD. Latar belakang terjadinya gerakan tersebut ialah kesenjangan ekonomi yang mencolok antara perwira tinggi dan perwira menengah-bawah. Para perwira tinggi dianggap telah hidup bermewah-mewah dan tidak memikirkan nasib bawahan. Para perwira tinggi juga dianggap akan melakukan tindakan makar terhadap presiden sehingga dibutuhkan tindakan penyelamatan Presiden Sukarno. Versi ini disusun secara sosiologis dengan klaim fakta yang didasarkan berita-berita resmi kelompok G-30-S. Dengan demikian versi ini lebih memihak klaim kelompok G-30-S.

Teori ketiga adalah keterlibatan Presiden Sukarno dalam *intrik* ini. Versi yang dikemukakan Antonie Dake dan John Hughes, menunjukkan bahwa G-30-S adalah skenario yang dipersiapkan Presiden Sukarno untuk melenyapkan oposisi

---

<sup>12</sup> Lihat Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Op.Cit.* serta buku Sekretariat Negara R.I, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1994).

<sup>13</sup> Justus M. Van Der Kroef, *Indonesia Since Soekarno*, (Singapore: Asia Pasific Press, 1971), hal.10 ; Seharto, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan KH*, (Jakarta: Cipta Lamtoro Gung Persada, 1989, hal 119 & 121.

sebagian perwira AD.<sup>14</sup> Versi ini terutama didasarkan keterangan Bambang Widjanarko, ajudan presiden, yang menyatakan presiden pernah meminta kesiapan Untung di Istana Tampak Siring, Bali, untuk mengamankan jenderal-jenderal yang tidak loyal. Pertanyaan serupa, kembali ditanyakan presiden kepada Men/Pangau Omar Dani dan Mayjen Mursyid.<sup>15</sup> Bukti lain yang diajukan versi ini adalah kehadiran Presiden di Halim pada 1 Oktober. Versi ini menyatakan, PKI ikut terseret dalam G-30-S, karena amat bergantung pada Presiden Sukarno.

Keterlibatan CIA dalam G-30-S didasarkan analisa global bahwa G-30-S adalah bagian dari konsekuensi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masing-masing pihak, memiliki kepentingan menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Melihat bahwa politik nasional Indonesia semakin mengarah kepada kelompok komunis, maka CIA berusaha lewat berbagai cara untuk menghancurkan Rezim Sukarno dan PKI. Diantaranya bantuan tersebut berupa pengucuran dana kepada KAP-Gestapu serta pemberian daftar-daftar nama yang harus dibersihkan. Kuat dugaan bahwa Soeharto menjadi kaki-tangan CIA. Wertheim menambahkan, Sjam yang disebut dalam *buku putih* sebagai kepala

---

<sup>14</sup> Lihat Antonie Dake, *Op.Cit.*, ; John Hughes, *The End of Sukarno, A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, (London: Angus & Robertson: 1967) serta Sugiarto Surojo, *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai: G-30-S/PKI dan Peran Bung Karno*, (Jakarta: Intermasa, 1988). Dalam ketiga buku ini, digambarkan mengenai dugaan adanya keterlibatan Sukarno dalam G-30-S. Terutama didasarkan keterangan Widjanarko, konsepsi ideologi yang dianut Sukarno dan kehadiran Sukarno di Halim pada 1 Oktober. Selain hal itu, buku-buku ini tidak memiliki argumentasi fakta lebih jauh mengenai keterlibatan Sukarno.

<sup>15</sup> Rahadi. S Karni (ed), *The Devious Dalang: Soekarno and the So-called Untung-Putsch Eye-Witnes report by Bambang S. Widjanarko*, (The Hague: 1974), hal.21

biro khusus C.C PKI adalah agen rangkap yang bekerja untuk Aidit dan AD. Versi ini diutarakan oleh Wertheim, Peter Dale Scott dan David T. Johnson.<sup>16</sup>

Sedangkan Teori Kelima yakni keterlibatan Soeharto dalam G-30-S, yang diutarakan Subandrio dan Latief. Subandrio melihat keterlibatan Soeharto dalam dua kategori, pertama menggunakan Latief-Untung dan kedua memakai Ali Moertopo-Yoga Soegama.<sup>17</sup> Latief dan Untung dibiarkan untuk melakukan operasi terhadap para jenderal, hal inilah yang membuat Soeharto luput dari sasaran. Sedang Ali-Yoga dipakai untuk melakukan manuver dan operasi intelejen. Selain itu tidak dilupakan, bahwa para pelaku G-30-S memiliki ikatan emosional yang cukup kuat dengan Soeharto.<sup>18</sup> Subandrio menyimpulkan, rangkaian peristiwa dari 1 Oktober hingga 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan lewat empat tahap. Pertama, menyingkirkan saingannya di AD seperti Ahmad Yani dan kawan-kawan. Kedua, membubarkan PKI sebagai rival berat tentara saat itu. Ketiga, melemahkan kekuatan pendukung Presiden dengan menangkap 15 menteri yang Pro-Sukarno. Tahap keempat,

---

<sup>16</sup> W.F Wertheim, *Suharto and the Untung Coup-the Missink Link*, (Journal of Contemporary Asia, Vol 1 No.2, Winter 1970) ; Peter Dale Scott, *Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno*. Makalah tidak diterbitkan ; David T. Johnson, *Gestapu: The CIA's "Track Two" in Indonesia*, [djohnson@cdi.org](mailto:djohnson@cdi.org), original version, 1976),

<sup>17</sup> Untung dan Latief merasa bahwa Soeharto adalah “kawan” dalam G-30-S. karena itu pada malam terjadinya gerakan, Latief mengaku sempat melaporkan rencana gerakan kepada Soeharto. Yoga ditarik menjadi intel Kostrad oleh Soeharto pada Januari 1965, ketika ia bertugas sebagai atase di Yugoslavia. Lihat Soebandrio, *Kesaksianku tentang G-30 S*, (Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001). lihat juga Wertheim, *Op. Cit.*, dan Abdul Latief, *Op. Cit.*, hal. 129.

<sup>18</sup> Untung adalah bawahan Soeharto ketika di Divisi Diponegoro, Latief anak buah Soeharto ketika di Werkheise III Jogja, sedang Sjam adalah teman Soeharto dalam kelompok “Pathuk”. Sampai terjadinya G-30-S antara ketiga orang ini, masih menjalani hubungan baik dengan Soeharto. Bahkan Soeharto menghadiri acara perkawinan Latief disebuah kota kecil di Jawa-Tengah. Diantara tokoh-tokoh penting G-30-S, hanya Latief dan Heru Atmodjo yang tidak dihukum mati.

mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno. Versi ini mendapat kritikan tajam dari John Roosa, karena menurutnya Soeharto tidak memiliki kapasitas seorang jenius. Selain itu, ikatan emosional yang diajukan sebagai bukti klaim lebih didasarkan dugaan, bukan fakta yang memadai.<sup>19</sup>

Teori Keenam adalah teori yang disampaikan Sukarno pada pidato pelengkap Nawaksara pada 22 Juni 1966. Presiden Sukarno mengutarakan bahwa peristiwa G-30-S merupakan pertemuan dari tiga sebab, yakni keblingnya pimpinan PKI, kelihaiian subversi Nekolim, dan adanya oknum-oknum yang tidak benar.<sup>20</sup> Versi ini menekankan bahwa pihak yang diuntungkan dari G-30-S adalah pihak imperialis asing, sehingga penekanannya adalah pada Nekolim. Versi ini terlihat lebih masuk akal, apalagi versi yang selama ini beredar menyebutkan adanya keterlibatan ketiga unsur tersebut.

#### **4.2 Pertemuan Halim, 1 Oktober 1965**

Pada pukul 16.00 tanggal 30 September 1965, Men/Pangau Omar Dani mendapat laporan dari intelnya, Heru Atmodjo,<sup>21</sup> bahwa pada malam hari akan diadakan sebuah gerakan internal AD yang dipimpin Brigjen Supardjo untuk

---

<sup>19</sup> John Roosa, *Ibid*, hal. Asumsi John Roosa jelas keliru karena rentang waktu kekuasaan Soeharto selama 32 tahun menunjukkan kejeniusannya sebagai pemimpin. Keberhasilannya mengorganisir kekuatan kontra G-30-S dan melakukan serangan balik secara cepat (kurang dari 24 jam aksi G-30-S), menunjukkan kapasitas kemampuan berfikir dan inisiatif yang kuat dari Soeharto.

<sup>20</sup> Substansi isi pidato ini dikutip dari buku *Penerbitan MPRS Tahun 1967*, No. 5, Hal 25-31..

<sup>21</sup> Letkol Penerbang Heru Atmodjo, alumnus pendidikan terbang Kalijati dan pernah ikut dalam penumpasan PRRI/Permesta. Saat terjadinya G-30-S menjabat sebagai Wakil Direktur Intelejen AURI. Dalam daftar nama anggota Dewan Revolusi G-30-S, namanya tercantum dalam urutan Wakil Ketua Dewan Revolusi. Keberadaannya sebagai intel patut dicurigai, apalagi ia adalah satu-satunya perwira yang aktif dalam G-30-S tetapi tidak mendapat hukuman mati.

menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal. Gerakan militer tersebut akan dilakukan para perwira muda yang merasa tidak puas dengan keadaan AD, karena adanya kesenjangan ekonomi antara para jenderal dan perwira rendahan. Heru Atmodjo mendapatkan info ini berdasarkan pembicaraannya dengan Mayor (Udara) Soejono yang termasuk anggota kelompok Supardjo, pada dua jam sebelumnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan info Heru Atmodjo, Omar Dani memerintahkan Heru Atmodjo untuk mencari tahu lebih banyak mengenai rencana aksi dan melaporkannya malam itu juga. Sekitar pukul 22.00 WIB, Heru Atmodjo kembali ke Markas Besar AURI dan bertemu dengan beberapa perwira senior AURI untuk melaporkan apa yang diketahuinya dari Soejono.<sup>23</sup> Adapun perwira AURI yang hadir pada malam itu, antara lain: Deputy Men/Pangau Bidang Operasi (DMPO) Komodor Ignatius Dewanto, Deputy Men/Pangau Bidang Logistik (DMPL) Komodor Agustinus Andoko dan PangKoops Komodor Leo Wattimena.<sup>24</sup> Laksdya Makki Perdanakusumah yang secara kebetulan berkunjung ke Wisma Angkasa juga ikut mendengarkan *briefing*. Leo Wattimena sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Pangkalan AURI Halim menyarankan kepada

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004: Benedicta A. Surodjo dan JMV Soeparno, *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, Pledoi Omar Dani*. (Jakarta: ISAI, 1999), hal.57. Heru Atmodjo berkeyakinan bahwa gerakan tersebut dipimpin oleh Brigjend Supardjo, mengingat Supardjo memiliki pangkat tertinggi dan kedudukan strategis dalam dinas militer diantara para pelaku gerakan. Saat terjadinya G-30-S, Supardjo bertugas sebagai Panglima Komandan Tempur (Pangkopur) Kostrad di Kalimantan-Barat dalam rangka operasi Dwikora. Keterangan ini dapat dilihat juga pada Hasil Mahmilub Untung ketika Omar Dani dimintai keterangannya sebagai saksi.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004. Lihat juga kesaksian Omar Dani dalam Mahmillub Dr. Subandrio.

<sup>24</sup> Omar Dani, *Op.Cit.*, hal 58.

Men/Pangau, apabila informasi intelejen terbukti benar, maka Men/Pangau hendaknya berjaga-jaga dan bermalam di Pangkalan AURI Halim. Akhirnya Omar Dani menerima saran tersebut. Lewat tengah malam, Men/Pangau mengajak ajudannya pergi ke Markas Koops Halim. Setelah tiba di Halim, karena kelelahan, Omar Dani langsung beristirahat hingga dibangunkan Pukul 06.00 pagi harinya.<sup>25</sup>

Sebagai pemimpin, Omar Dani memiliki jalur koordinasi yang baik dengan bawahannya, seperti adanya kemudahan mendapatkan berita-berita terbaru mengenai informasi gerakan. Namun, sebagai Men/Pangau Omar Dani tidak berusaha melaporkan informasi intelnya yang demikian penting kepada presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Seakan-akan Omar Dani ingin menyimpan rapi rahasia tersebut dikalangan AURI atau demi kepentingan tertentu.

Adapun keberadaan Untung, Latief dan Sjam, sebagai pemimpin G-30-S, sejak malam hingga saat presiden berada di Pangkalan AURI Halim, berada di Penas. Kemudian baru pada pagi harinya, mereka pindah ke rumah Sersan (Udara) Anis Sujatno yang terletak di wilayah Halim. Ketika berada di rumah Anis Sujatno, aktivitas mereka lebih ditujukan untuk beristirahat dan sedikit berdiskusi mengenai perkembangan gerakan. D.N Aidit, Ketua CC PKI sebagai orang yang diduga dalang G-30-S, berada di Halim sejak malam 1 Oktober dan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 59-60 dan 65.

langsung berkedudukan di rumah Sersan dua Suwardi.<sup>26</sup> Aktivitas D.N Aidit ketika berada di Halim tidak begitu jelas, apalagi kemudian ia dibunuh sebelum memberi kesaksian di pengadilan.<sup>27</sup>

Ternyata laporan Heru Atmodjo benar-benar menjadi kenyataan. Omar Dani teringat saran Heru Atmodjo, apabila operasi yang dilaporkan benar-benar terjadi, maka hendaknya Men/Pangau membuat surat pernyataan. Dengan segera Omar Dani membuat surat pernyataan berdasarkan informasi sebelumnya, dengan kepercayaan bahwa suatu gerakan yang bertujuan mengamankan presiden dan kewibawaannya haruslah didukung.<sup>28</sup> Karena G-30-S, seperti yang diklaim Untung, adalah sebuah gerakan penyelamatan presiden maka surat pernyataan AURI bersifat mendukung G-30-S. Setelah dikoordinasikan dengan Pangkoops Leo Wattimena dan DMPO Ignatius Dewanto maka surat tersebut dikirim untuk disiarkan lewat RRI.

Sekitar pukul 08.00 WIB, Omar Dani mendapat kabar dari ajudan presiden, Letkol Suparto, bahwa presiden akan pergi ke Pangkalan AURI Halim. Kepergian Presiden Sukarno ke Halim didasarkan kepada tidak menentukannya situasi di Jakarta, terutama setelah presiden Sukarno menerima laporan adanya

---

<sup>26</sup> Tidak begitu jelas mengenai kedatangan Aidit ke Halim serta hal yang mendorongnya kesana. Justus Van Der Kroef, berdasarkan keterangan istri Aidit menyebutkan bahwa kepergian Aidit ke Halim adalah karena diculik kelompok Untung. lihat Justus M. Van Der Kroef, *Op.Cit.*, hal.13; David T. Johnson, *Op.Cit.*, hal.11. Namun demikian, keterangan Kroef tidak berdasar bukti apapun. Apabila Aidit di culik, maka ia tidak ditemani tokoh PKI lainnya, yaitu Iskandar Subekti dan Munir.

<sup>27</sup> Penghilangan “jejak” Aidit dimungkinkan sebagai upaya untuk mengubur kejelasan G-30-S, mungkin juga hal ini dilakukan oleh pihak tertentu yang apabila Aidit dibiarkan berbicara maka akan membuka tabir rahasia yang lebih besar.

<sup>28</sup> Omar Dani, *Op.Cit.*, hal.66. Pembahasan lebih lanjut mengenai surat pernyataan Omar, lihat pada Bab V tentang akhir kepemimpinan Omar Dani.

penembakan dan penculikan di beberapa rumah perwira tinggi AD. Berdasarkan doktrin Tjakrabirawa, apabila keamanan presiden terancam, maka presiden harus segera diselamatkan ke area yang aman. Menurut keterangan Maulwi Saelan, Wakil Komandan Tjakrabirawa yang saat itu bersama presiden, kedatangan Presiden Sukarno ke PAU Halim adalah semata berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP). Sesuai SOP, terdapat dua pilihan pengamanan presiden yaitu PAU Halim yang terdapat pesawat khusus kepresidenan *Jetstar C-140*, serta Tanjung Priok yang terdapat kapal kepresidenan R.I *Varuna*.<sup>29</sup> Akhirnya presiden memilih pergi ke PAU Halim, karena disana terdapat Men/Pangau Omar Dani yang loyalitasnya terhadap presiden tidak diragukan.

Presiden berangkat dari rumah Harjati pukul 08.30 WIB dan tiba di Pangkalan AURI Halim pada pukul 09.30 WIB. Kedatangan presiden disambut oleh Men/Pangau Omar Dani dan Komodor Leo yang didampingi oleh perwira intelejen. Presiden kemudian beristirahat di rumah Komodor Soesanto. Brigjen Supardjo yang sejak pagi hari mencari presiden di Istana, dengan ditemani Heru Atmodjo tiba di Halim pada pukul 10.30 menggunakan helikopter AURI. Setelah meminta izin Men/Pangau, Supardjo kemudian berhasil menemui presiden dalam sebuah kamar di rumah Komodor Soesanto dan menceritakan seputar kejadian 1 Oktober. Brigjen Supardjo juga meminta dukungan presiden terhadap aksi G-30-S. Presiden menolak memberi dukungan dan kemudian memberi perintah agar

---

<sup>29</sup> Maulwi Saelan, *Dari Revolusi '45 sampai kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa*, (Jakarta: Yayasan Hak Bangsa, 2001), hal.311

Supardjo dengan segera mengakhiri gerakan serta menghimbau agar tidak terjadi pertumpahan darah.

Presiden kemudian memerintahkan Komisararis Besar (Kombes) Polisi. Soemirat untuk memanggil Men/Pangal Laksamana Madya Laut R.E Martadinata, Men/Pangak Inspektur Jenderal Pol. Soetjipto Joedodihardjo, Pangdam V/Jaya Mayjen Umar Wirahadikusuma dan Jaksa Agung Brigjen Sutardio. Wakil perdana menteri yang dipanggil hanya Dr. Leimena (Waperdam II).<sup>30</sup> Pukul 12.00, Dr Leimena tiba di PAU Halim dengan pesawat helikopter *syorsky* kepresidenan. Kemudian pukul 13.00 tiba di Pangkalan AURI Halim, Laksdya Laut RE. Martadinata, Jaksa Agung Brigjen Soetardio dan Inspektur Soetjipto dengan menggunakan helikopter ALRI. Satu-satunya undangan yang tidak hadir ialah Umar Wirahadikusumah, karena dilarang Soeharto.

Selama di Pangkalan AURI Halim, Presiden Sukarno menerima berbagai informasi mengenai perkembangan situasi nasional terutama yang terjadi di Jakarta. Ketika presiden mendengar kabar terbunuhnya Letjen Ahmad Yani, maka presiden segera bermusyawarah dengan undangan yang ada dan kemudian menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamodra sebagai pejabat carateker Men/Pangad, tetapi pelaksana sehari-hari dipegang Pangkostrad. Presiden kemudian memerintahkan Men/Pangal Martadinata memanggil Mayjen Pranoto menghadap ke Pangkalan AURI Halim. Namun, Mayjen Pranoto tidak pernah datang, karena

---

<sup>30</sup> Dr Subandrio yang menjabat Waperdam I saat itu sedang mengadakan kunjungan ke Medan. Sedangkan Chaerul Saleh sebagai Waperdam III, sedang memimpin perutusan MPRS ke RRC.

dilarang oleh panglima Kostrad, Mayjen Soeharto yang tidak mau mengambil resiko kemungkinan bertambahnya korban jenderal AD. Setelah Pranoto tidak datang, lewat Kolonel Widjanarko, Soeharto menyarankan agar Presiden Sukarno keluar dari Pangkalan AURI Halim. Hal itu dilaporkan kepada Dr. Leimena pada pukul 21.00 dan Leimena pun sependapat dengan saran Soeharto. Brigjen Sabur juga mendapat telepon dari Kostrad untuk membawa Presiden Sukarno keluar Pangkalan AURI Halim.

Setelah Presiden Sukarno berdiskusi dengan Men/Pangau Omar Dani, dengan berbagai pertimbangan akhirnya presiden bersedia keluar dari Pangkalan AURI Halim menuju ke Istana Bogor. Pilihan daerah tujuan Istana Bogor adalah atas pertimbangan dari Leimena, bahwa di Bogor kondisi cukup strategis. Selain dekat dengan pusat pemerintahan Jakarta, Kota Bogor dinilai relatif aman karena terdapat helikopter dan perlindungan Pangdam Siliwangi, Ibrahim Adjie yang dapat dipercaya.<sup>31</sup> Pada pukul 22.00 WIB, Presiden Sukarno dengan menggunakan mobil berangkat ke Istana Bogor. Pada pukul 24.00 WIB, Menteri Koordinator D.N Aidit terbang ke Yogyakarta diikuti Bridgjen Supardjo yang juga terbang ke Madiun. Omar Dani sendiri memutuskan pergi ke Madiun, sekaligus melakukan pemantauan udara bersama komodor Leo Wattimena.

---

<sup>31</sup> Ibrahim Adjie adalah salah seorang perwira yang Pro-Sukarno, tetapi ia anti komunis. Ia kurang begitu disukai Nasution karena kedekatannya dengan Sukarno. Terlebih lagi karena Adjie pernah menceraikan isterinya dan kemudian menikah kembali dengan perempuan Yugoslavia. Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal.266-267

Pasca peristiwa di Pangkalan AURI Halim, muncul dugaan bahwa keberadaan Presiden Sukarno, Supardjo, D.N Aidit dan Omar Dani sebagai keterlibatan mereka dalam G-30-S. Presiden sendiri membantah adanya isu ini dalam siaran R.R.I pada tanggal 3 Oktober 1965:

“ Kepergian saja ke Pangkalan Angkatan Udara Halim pada tanggal 1 Oktober pagi-pagi, adalah atas kehendak saja sendiri. Karena saja berpendapat bahwa tempat jang terbaik bagiku, ialah tempat dekat kapal udara jang dapat mengangkut saja tiap saat ketempat lain, kalau terdjadi sesuatu jang tak diharapkan ”<sup>32</sup>

Menurut Omar Dani, kedatangannya ke Pangkalan AURI Halim, bukan karena keterlibatannya dalam kelompok G-30-S melainkan karena tanggung jawabnya sebagai Men/Pangau untuk melakukan pemantauan terhadap isu yang diterimanya dari Letkol Heru Atmodjo. Namun, Omar seakan tidak menyadari adanya implikasi logis bahwa keberadaannya di dekat pelaku G-30-S hanya akan membangun opini keterlibatannya dalam G-30-S. Selain itu, tindakan Omar yang mengirimkan helikopter untuk menjemput Supardjo dan Heru Atmodjo di Istana Merdeka adalah suatu tanggung jawab yang berlebihan dalam kapasitasnya sebagai Men/Pangau. Saat berada di Pangkalan AURI Halim, Omar Dani juga menjadi penghubung dalam pertemuan antara Presiden Sukarno dan perwakilan kelompok G-30-S, Brigjen Supardjo.

Namun, kedatangan Presiden Sukarno ke Pangkalan AURI Halim, bukan didasarkan permintaan Men/Pangau Omar Dani, tetapi berdasarkan SOP dan

---

<sup>32</sup> ANRI. Amanat JPM Presiden Sukarno kepada seluruh rakjat Indonesia berhubung dengan peristiwa Gerakan 30 September. Lihat lampiran 2

keinginan presiden sendiri. Menurut Omar Dani, pertemuannya dengan Supardjo, juga disebabkan karena perwakilan kelompok G-30-S ingin menghadap presiden, sehingga secara prosedural, tamu yang datang diwajibkan untuk melapor terlebih dahulu. Walaupun demikian, kehadiran Omar Dani di Pangkalan AURI Halim, disadari atau tidak, telah dimanfaatkan oleh kelompok Untung untuk memberi kesan dukungan panglima AURI dalam G-30-S.<sup>33</sup>

Keberadaan D.N Aidit, Ketua CC. PKI yang disebut-sebut sebagai dalang G-30-S di Pangkalan AURI Halim pada 1 Oktober tidak berkaitan dengan AURI. Walaupun Aidit berada di Halim, tetapi tidak ada ketidakjelasan mengenai aktivitas Aidit terhadap perwira AURI. Hal ini tentunya mengundang praduga, adanya rekayasa untuk memposisikan Aidit di Pangkalan AURI Halim, untuk menimbulkan kesan bahwa AURI yang memberikan fasilitas. Menurut Omar Dani, kepergian DN. Aidit dari Pangkalan AURI Halim ke Yogyakarta dengan pesawat terbang AURI, bukan karena AURI terlibat dalam G-30-S melainkan karena kedudukannya sebagai Menteri Koordinator.<sup>34</sup> Namun, mengapa kepergian Menko yang difasilitasi AURI terjadi pada saat kegagalan G-30-S dan tidak bersama dengan menteri lainnya. Padahal Menko atau menteri yang perlu

---

<sup>33</sup> Benedict R. Anderson and Ruth T. Mc Vey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*, (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University Press, 1971), hal. 19. *Cornell Paper* lebih jauh mengatakan bahwa Omar diculik bukan pergi, tetapi hal ini sangat bertentangan dengan keterangan dalam biografinya serta pengakuan Omar di depan Mahmilub.

<sup>34</sup> Wisnu Djajengminardo, *Saya Srigala Terbesar dari Halim*, Tempo, 20 Juni 1999; Wawancara Sri Mulyono Herlambang 27-05-2004.

mendapatkan rasa aman tidak hanya DN. Aidit. Tentunya hal ini tidak dapat dijawab Omar.

Namun, pengkaitan keempat tokoh nasional di Pangkalan AURI Halim dengan G-30-S sebagai suatu komplotan dan berada pada tempat yang sama juga merupakan suatu kekeliruan.<sup>35</sup> Diantara mereka berada pada tempat berbeda dan tidak bertemu satu sama lain. Tokoh G-30-S berkumpul di Gedung Penas, Presiden Sukarno beserta pengikutnya berada di rumah Direktur Operasi AURI, Komodor Udara Susanto dalam Pangkalan AURI Halim, sedangkan DN. Aidit berada di rumah Sersan Dua Suwardi. Praktis tokoh G-30-S yang bertemu dengan presiden hanyalah Brigjen Supardjo. Apabila antara keduanya berkomplot, maka menjadi hal yang aneh ketika pada pagi harinya Supardjo menyiapkan waktu yang penting untuk mencari dan melapor kepada presiden di Istana. Sikap penolakan Presiden Sukarno untuk ikut mendukung gerakan Supardjo, juga membuktikan tidak adanya konspirasi di Pangkalan AURI Halim.

**Tabel 1**  
**Posisi Keberadaan Tokoh Nasional di Halim pada 1 Oktober 1965**

<b>Tempat 1</b> <i>Penas</i>	<b>Tempat 2</b> <i>Rumah Sersan Suwardi</i>
Latief, Untung dan Sjam	Menko D.N Aidit, Iskandar Subekti, Munir

---

<sup>35</sup> Sebagai contoh lihat uraian Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideologi and Politics 1959-1965*, (London: Cornell University Press, 1974), hal. 414.

<b>Tempat 3</b> <i>Rumah Komodor Susanto</i>
Presiden Sukarno, Omar Dani, Supardjo, Martadinata, Leimena Dll.

Sumber:

Diolah oleh peneliti dari Katoppo (2000), Sekretariat Negara (1995), Omar Dani (2000) dan John Roosa (2008)

Namun demikian, keluarnya Presiden Sukarno dari Pangkalan AURI Halim ke Istana Bogor didasarkan karena adanya ancaman Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto. Sejak 1 Oktober 1965, panglima Kostrad menjadikan lembaganya bersifat otonom dan tidak menaati kebijakan presiden. Hal ini tampak dari penolakan Soeharto atas undangan presiden agar Mayjen Pranoto dan Umar Wirahadikusumah datang ke Pangkalan AURI Halim. Soeharto bahkan mengeluarkan isi pesan yang bernada ancaman terhadap Presiden, agar presiden segera keluar dari pangkalan udara Halim karena berada “ditempat yang salah” dan Halim akan segera diserbu. Presiden sendiri kemudian pergi ke Bogor dengan menggunakan Jeep, suatu hal yang menunjukkan ketidakberdayaannya. Karena apabila disesuaikan dengan prosedur SOP, maka seharusnya presiden diangkut menggunakan pesawat udara.

#### **4.3 Halim, 2 Oktober**

Setelah Presiden Sukarno keluar dari Pangkalan AURI Halim, AD menilai bahwa sisa kekuatan G-30-S masih berkumpul di Pangkalan AURI Halim. Kekhawatiran AD semakin diperkuat dengan munculnya isu rencana pengeboman

AURI terhadap Kostrad, sehingga Mayjen Soeharto memindahkan untuk sementara Markas Kostrad ke Senayan. Ternyata serangan udara tersebut tidak pernah terjadi. Namun, adanya isu ancaman tersebut mengakibatkan persiapan-persiapan Suharto tertunda beberapa jam.<sup>36</sup>

Pada pukul 02.00 WIB tanggal 2 Oktober, Panglima Kostrad yang telah mengambil alih kepemimpinan AD memerintahkan Komandan RPKAD, Kol. Sarwo Edhie, untuk menguasai Pangkalan AURI Halim dan memastikan kekalahan G-30-S. Mayjen Suharto memberi pesan singkat agar Sarwo Edhie menghindari terjadinya pertumpahan darah dan kerusakan material. Mayor C.I Santoso, Komandan Rayon I/RPKAD yang mendapat perintah tugas operasional, kemudian mengadakan *briefing* bersama kompi-kompi yang ikut didalamnya untuk menjelaskan sasaran operasi dan pesan pangkostrad di atas. Menjelang pukul 05.30 WIB, setiap komandan kompi telah siap bergerak masuk ke PAU Halim sambil menunggu komando.

Keberadaan pasukan RPKAD di sekitar PAU Halim telah diketahui staf PGT sejak pukul 05.30 WIB. Jarak antara penjagaan PGT dengan RPKAD hanya  $\pm$  150 meter. Men/Pangau Omar Dani yang mengetahui informasi tersebut, segera memerintahkan Panglima Koops AURI, Komodor Leo Wattimena agar membuat

---

<sup>36</sup> Serangan udara tersebut sempat menjadi pembicaraan tokoh G-30-S di Halim. Hal ini merupakan saran yang dilontarkan Brigjen Supardjo, karena hanya bantuan AURI lah satu-satunya jalan yang dapat memenangkan kelompok G-30-S. Namun, ternyata Omar Dani tidak pernah melakukan pengeboman yang diinginkan. Hal ini juga menandakan bahwa AURI memang tidak terlibat dalam aksi G-30-S sebagaimana direncanakan oleh kelompok Untung. Lebih lanjut Lihat John Roosa, *Ibid*, hal 83 dan perhatikan juga uraian lengkap kritik Supardjo pada bagian lampiran buku roosa tersebut.

radiogram ke Pangkalan AURI Halim untuk selanjutnya diteruskan kepada Mayjen Soeharto. Inti dari radiogram yang dimaksud ialah agar pasukan AD jangan masuk ke Halim, karena di Pangkalan AURI Halim tidak ada Brigjen Supardjo. Namun isi radiogram yang dikirim Leo bernada agak berbeda yaitu “Angkatan Darat jangan masuk ke Halim, kalau masuk akan dihadapi”. Isi dari radiogram, menimbulkan kesan bahwa AURI telah siap untuk berhadapan secara fisik dengan AD.<sup>37</sup>

Tepat pukul 06.00 WIB pasukan RPKAD mulai masuk ke Pangkalan AURI Halim. Pasukan tersebut langsung menduduki sasaran seperti yang diperintahkan dalam *briefing*. Pasukan RPKAD yang memasuki Skuadron-31, tidak mendapatkan perlawanan dari AURI. Satu-satunya insiden terjadi di depo perminyakan, saat pasukan RPKAD menembak mati dua orang perwira AURI yang hendak mengambil senjata yang tidak disandangnya. Sementara pasukan RPKAD menguasai Halim, satu kompi Yon 328/Para melakukan *stelling* didekat PN Intirub, melucuti senjata anggota AURI yang keluar masuk pangkalan.<sup>38</sup>

Saat seluruh kompi Yon-1/RPKAD di PAU Halim melakukan konsolidasi, menjelang pukul 10.00 Kolonel Sarwo Edhi mengirim berita lewat radio kepada Mayor C.I Santoso bahwa ia akan masuk ke Halim menemui presiden. Mayor C.I Santoso menyarankan agar komandan RPKAD masuk lewat Klender kearah

---

<sup>37</sup> Aristides Katoppo., et.al., *Menyingkap Kabut Halim 1965*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal. 151. Ashadi Tjahjadi menyebutkan bahwa telegram ini dikeluarkan oleh Leo dari Malang tanpa sepengetahuan Omar Dani. Lihat. Imran Hasibuan dkk, *Loyalitas Tanpa Pamrih: Biografi Marsekal (Purn) Ashadi Tjahjadi*, (Jakarta: Q Communication dan Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 117.

<sup>38</sup> Aristides Katoppo., *Ibid.*, hal. 154

Pondok Gede. Karena jalur Pondok Gede-Halim belum diamankan, maka ia memerintahkan Kompi Kajat/Cadangan dan Kompi-B-Yonkav-1/Panser Kostrad RPKAD yang berada di sekitar PN Intirub untuk mengawal. Kekhawatiran Mayor C.I Santoso ternyata benar. Ketika melintasi arah *dropping zone* Lubang Buaya, pecah pertempuran dengan Yon 454/ Raiders/Diponegoro di bawah pimpinan Kapten Koentjoro. Dalam pertempuran tersebut, seorang anggota kompi cadangan yang mengawal Sarwo Edhi gugur.

Deputi Operasi Men/Pangau, Komodor Dewanto dan perwira intelejen AURI, Kapten (Udara) Kundimang yang berada dihanggar skatek ketika mendengar suara tembakan, segera berinisiatif untuk menyelamatkan Pangkalan AURI Halim dari kehancuran. Kedua perwira tersebut, memberanikan diri menjadi penengah antara pasukan AD yang sedang bertempur. Proses mediasi yang mereka lakukan akhirnya berhasil, pertempuran berhenti sesudah diadakan pertemuan antar komandan. Kapten Kuntjoro beserta pasukannya kemudian mengundurkan diri dari Halim menuju ke Senayan sekitar pukul 06.30 WIB 3 Oktober. Setelah tiba di Senayan, mereka lalu ditahan di stadion utama. Dua puluh anggota Yon 454/Raiders lainnya yang berusaha melarikan diri ke Jawa-Tengah berhasil ditangkap Kompi Ramelan, Yon-1/RPKAD. Sedangkan 97 anggota Yon 454/Raiders dan 140 anggota Yon 530/Raiders, ditangkap dalam

pengejaran satu kompi Yon 203 Kodam V Djadja dan Kavaleri Yonkav-7/Panser Kostrad.<sup>39</sup>

Uraian kronologi diatas menunjukkan, tidak adanya campur-tangan AURI dalam pertempuran di Pangkalan AURI Halim. AURI memang melakukan gertakan kepada RPKAD untuk tidak masuk ke PAU Halim, tetapi gertakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi instalasi AURI bukan karena dukungannya terhadap G-30-S. Justru dalam pertempuran antara kekuatan Kostrad dan G-30-S, AURI bertindak sebagai penengah.

Namun, surat gertakan yang dibuat oleh Leo Wattimena menarik untuk dipertanyakan. Surat yang awalnya adalah perintah Omar Dani untuk melindungi Pangkalan AURI Halim, diterjemahkan Leo Wattimena dalam bahasa gertakan. Hal yang aneh ialah pada tengah hari 1 Oktober sebelum Pangkalan AURI Halim diserang RPKAD, Leo bertemu dengan Soeharto di Markas Kostrad. Dalam pertemuan tersebut Leo memberitahukan sikap AURI seperti yang dijelaskan dalam briefing malam 30 September, sedangkan Soeharto memberikan pengarahan bahwa pusat komando pimpinan G-30-S berada di pangkalan AURI Halim, pimpinan G-30-S terdapat oknum AURI dan Halim sebelumnya telah dijadikan tempat latihan Pemuda Rakyat.<sup>40</sup> Didepan Soeharto, Leo mengiyakan pengarahan Soeharto. Dengan demikian, terdapat suatu keganjilan bahwa Leo

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 156-176

<sup>40</sup> Soeharto, *Op.Cit.*, hal. 122-124.

yang menyatakan persetujuannya dengan Soeharto, juga adalah yang membuat surat untuk menggertak pasukan Soeharto.<sup>41</sup>

#### 4.4 Daerah Lubang Buaya.

Lubang Buaya yang berada di pinggir tenggara kota Jakarta, dikenal sebagai tempat dikuburkannya para jenderal secara paksa dalam peristiwa G-30-S. Lubang Buaya juga merupakan tempat pelatihan para sukarelawan dan sukarelawati yang kelak pada 1 Oktober 1965 menjadi tenaga operasi "pembersihan" para jenderal Angkatan Darat. Keberadaan Lubang Buaya yang berada di pinggiran kota dan belum terdapat hunian yang padat, merupakan pilihan yang tepat untuk merencanakan suatu kegiatan rahasia. Letaknya yang berada didekat pangkalan udara Halim menyamarkan keberadaan letak tempat tersebut, sehingga keberadaannya sering disangkut-pautkan dengan AURI.

Dilihat dari sudut geografis Halim, maka Desa Lubang Buaya tempat beradanya sumur maut, terletak di luar batas Pangkalan AURI Halim. Lubang Buaya yang dimaksud, kalau ditarik lurus berjarak tiga setengah kilometer dari Markas Koops yang berada di PAU Halim Perdanakusumah. Letaknya berada diluar zona kekuasaan AURI yang dipisahkan oleh jalan raya Pondok Gede dengan Halim dan berada di dalam wilayah administratif Desa Lubang Buaya,

---

<sup>41</sup> Menarik untuk dicermati bahwa pasca G-30-S, Leo yang loyal kepada Omar Dani dan mengetahui seputar Peristiwa Halim 1 Oktober, tidak ikut disingkirkan oleh Soeharto seperti para perwira AURI lainnya. Leo terus berdinasi di AURI hingga menikmati pensiun setelah mengundurkan diri secara wajar. Karier terakhirnya adalah duta besar R.I di Roma.

kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa-Barat.<sup>42</sup> Di Pangkalan AURI Halim memang terdapat daerah Lubang Buaya, tetapi area tersebut adalah tempat latihan penerjunan (*dropping zone*) dan secara geografis keduanya adalah tempat yang berbeda.

Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto adalah tokoh yang sedari awal menyebutkan keberadaan Lubang Buaya tempat mayat jenderal dikubur sebagai daerah AURI. Pengaburan fakta ini dinyatakan Soeharto dalam kesempatan pemberian pidato sambutan pada saat penemuan dan penggalian korban Jenderal pada 4 Oktober 1965. Soeharto dengan mengenakan kacamata hitam, mengatakan:

“Kalau kita lihat tempat ini, adalah di Lobang Buaya. **Daerah Lobang Buaya adalah termasuk dari daerah Lapangan Halim.** Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta, bahwa dekat pada sumur ini, telah menjadi pusat daripada latihan sukwan dan sukwati, jang dilakukan atau dilaksanakan oleh A.U”<sup>43</sup>

Tentunya, pernyataan Soeharto ini tidak berdasar karena ia tidak melakukan pengecekan ulang keberadaan wilayah Lubang Buaya. Keganjilan lain, ketidaktahuan Soeharto juga merupakan tanda-tanya, karena Desa Lubang Buaya tempat para jenderal dikuburkan, pada tanggal 5 Juli 1965 sebelumnya

---

<sup>42</sup> Berdasarkan peta Jakarta 1965, tidak terdapat kecamatan Pondok Gede. Rincian mengenai daerah Halim tidak dapat peneliti temukan hingga tesis, walaupun telah dilakukan pencarian data Ke Badan Pertanahan Nasional (baik pusat maupun wilayah Jakarta), Lembaga Informasi Nasional Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanahan setempat (Jakarta dan Jakarta-Timur). Satu-satunya peta berharga untuk menjelaskan secara *scientific* adalah data dari AURI yang kemudian dijadikan lampiran dalam buku Aristides dkk. Selain sumber AURI, kajian John Roosa, *Dalih Pembunuhan Masal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008) juga melampirkan peta Halim. Untuk lebih jelasnya perhatikan peta daerah Halim pada lampiran 3.

<sup>43</sup> Lihat Lampiran 4. Cetak tebal dari peneliti

telah digunakan sebagai tempat upacara pemindahan pasukan Siliwangi dan Brawijaya AD ke bawah komando Mayjen Soeharto sebagai panglima Kostrad.<sup>44</sup> Dengan demikian pidato Soeharto lebih merupakan suatu upaya untuk mendiskreditkan AURI.<sup>45</sup>

#### 4.5 Dugaan Keterlibatan AURI dalam G-30-S

Adanya keterlibatan beberapa oknum dan penggunaan fasilitas institusi AURI, melahirkan kecurigaan berbagai pihak, bahwa AURI di bawah komando Omar Dani secara institusi ikut terlibat dalam G-30-S.<sup>46</sup> Apalagi pernyataan sikap Omar Dani pada pukul 10.00, 1 Oktober 1965, terkesan memberi dukungan terhadap operasi G-30-S.

Dalam pidato pengumumannya di RRI, Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto cenderung menyudutkan AURI. Mayjen Soeharto secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam proses perubahan politik pasca G-30-S, AD- ALRI dan AKRI berada dalam pihak yang sama, sedangkan AURI sengaja tidak disebutkan berada dipihak yang mana. Mayjen Soeharto dalam pidato pada 1 Oktober malam menuturkan bahwa ”untuk sementara pimpinan AD kami pegang. Antara **AD**, **ALRI** dan **AKRI** telah terdapat saling pengertian, bekerdja sama dan

---

<sup>44</sup> *Kompas*, 6 Juli 1965; Crouch hal 107. Dari fakta ini, maka kita akan mendapatkan sebuah asumsi secara logis bahwa bagi Soeharto tempat ini bukanlah tempat yang asing. Bukan tidak mungkin, ia juga mengetahui adanya pelatihan sukarelawan disana. Mengingat disaat yang sama dilakukan pelatihan di bawah koordinasi Mayor (Udara) Soejono.

<sup>45</sup> David T. Johnson, *Op.Cit.*, hal.10.

<sup>46</sup> Sebagai contoh lihat Paul.F. Gardner, *50 Tahun Amerika Serikat-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal.440-441. Gardner menuding Omar Dani-lah yang menyiapkan markas G-30-S di Halim.

kebulatan tekad penuh, untuk menumpas perbuatan Kontra Revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”<sup>47</sup>

Selain kecurigaan yang dituturkan Soeharto, kecurigaan terhadap keterlibatan institusi AURI juga berlanjut dalam tataran akademis. Berbagai peneliti asing yang melakukan pengkajian mengenai peristiwa G-30-S, seperti Ulf Sundhaussen, menuliskan keterlibatan AURI berdasarkan kecurigaan PAU Halim, surat perintah Men/Pangau 1 Oktober serta pidato-pidato yang dilancarkan Soeharto.<sup>48</sup>

#### **4. 5.1 Pelatihan Sukarelawan**

Dalam peristiwa G-30-S, para pemerhati peristiwa ini melihat adanya keterlibatan AURI dalam proses pelatihan sukarelawan yang kemudian tenaganya digunakan sebagai tenaga operasional G-30-S. Fakta ini sering digunakan untuk menyimpulkan bahwa secara institusi AURI memang mendukung G-30-S.<sup>49</sup>

Menjelang 1965, PKI mengusulkan kepada presiden Sukarno tentang diperlukannya Angkatan Kelima yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai dalam memperkuat revolusi nasional. Menanggapi isu tersebut, AURI menyatakan persetujuannya, terutama sebagai kebutuhan praktis untuk menutupi kekurangan personel menjaga pangkalan-pangkalan AURI. Adapun mengenai komponen rakyat yang dilatih tersebut, secara prosedural diutamakan berasal dari rakyat

---

<sup>47</sup> Pidato Mayjen Soeharto pada 1 Oktober Malam di R.R.I. Cetak tebal dari peneliti. Lebih lanjut, lihat Lampiran 5.

<sup>48</sup> Ulf Sundhaussen, *Op.Cit.*, hal. 375

<sup>49</sup> John Hughes, *Op. Cit.*, hal. 23

yang berada di daerah sekitar pangkalan. Selanjutnya, Men/Pangau Omar Dani mengintruksikan kepada seluruh penanggung jawab pangkalan untuk melatih rakyat untuk menjaga pangkalan atau sering disebut Hansip AURI.

Pada bulan Juli 1965, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan, (PPP) Mayor (Udara) Soejono melaporkan kepada Men/Pangau Omar Dani di Wisma Angkasa mengenai rencana pelaksanaan wisuda sukarelawan angkatan pertama. Soejono juga melaporkan komposisi peserta serta diperlukannya bantuan-bantuan AURI untuk pelatihan mendatang. Peserta pelatihan adalah anggota Front Nasional yang terdiri dari lima orang golongan nasionalis, 2000 orang golongan komunis. Adapun golongan agama tidak diundang.<sup>50</sup> Menurut Omar Dani, setelah mendengar laporan tersebut, ia mengintruksikan agar dalam pelatihan berikutnya komposisi antara golongan Nasionalis-Agama dan Komunis dapat berimbang. Men/Pangau juga mengintruksikan agar setiap detail pelatihan sebaiknya dicatat dan dilaporkan kepada staf yang bersangkutan di AURI.<sup>51</sup> Laporan tentang pelatihan itu selanjutnya dapat digunakan sebagai *standard* dalam pelatihan di pangkalan udara seluruh Indonesia. Akhirnya, Men/Pangau tidak bersedia mewisuda pelatihan tersebut. Mengenai permohonan bantuan AURI terhadap pelatihan, Men/Pangau menyarankan agar hal tersebut ditanyakan kepada staf berwenang di Departemen AURI. Secara prinsip, ia menyetujui pemberian bantuan dalam batas kemampuan AURI.

---

<sup>50</sup> Aristides, *Op.Cit.*, hal. 32

<sup>51</sup> Pembelaan Omar Dani, dalam Omar Dani, *Op.Cit.*, hal. 240-241.

Pelatihan sukarelawan di Desa Lubang Buaya yang semula dilakukan untuk sukarelawan Dwikora, pada angkatan kedua telah diubah menjadi pelatihan kader PKI, karena pesertanya berasal dari unsur PKI atau yang bersimpati terhadap PKI.<sup>52</sup> Akibatnya latihan kemiliteran di Desa Lubang Buaya kemudian menjadi permasalahan dikalangan AURI.

Saat Letkol (Udara) Farman, Kepala Pusat Penerangan AURI menugaskan kepada juru kamera untuk membuat dokumentasi film tentang pelatihan di Desa Lubang Buaya, mereka tidak diizinkan masuk ketempat pelatihan.<sup>53</sup> Pada awal September 1965, Komodor Dewanto, Deops Men/Pangau merangkap Direktur intelejen AURI memanggil Komodor Ramli Soemardi; panglima KOPPAU, Mayor (Udara) Soejono; Komandan Resimen PPP, Letkol (Udara) Hamsana; Perwira Operasi Korud V Jaya, Letkol (Udara) Rakiman; perwira KOPPAU dan beberapa perwira lain menghadiri rapat yang membahas mengenai pelatihan itu. Saat itu juga Komodor Dewanto memerintahkan agar latihan kemiliteran di Desa Lubang Buaya segera ditutup. Namun, perintah itu baru berhasil dilakukan pada 26 September 1965.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Dalam prakteknya yang menjadi pemegang wewenang dalam pelatihan tersebut tidak hanya Mayor Sujono dan orang-orangnya. Melainkan juga Nico dari Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Djohar dari Pemuda Rakyat (PR), Kasiman dari Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Hartojo dari Barisan tani Indonesia (BTI). Anggota CC PKI yang bertindak sebagai pengajar antara lain Tjugito dan Soemardi.

<sup>53</sup> Ketika Komodor Dewanto memantau kembali tempat tersebut, ternyata tempat tersebut sudah ditutup. Praktis secara institusi AURI tidak pernah tahu apa-apa yang dilakukan sesungguhnya.

<sup>54</sup> Aristides, *Op.Cit.*, hal 34-35

Selanjutnya sesudah terjadinya G-30-S, baru dapat diketahui bahwa sebagian bekas peserta pelatihan tersebut dimasukkan dalam pasukan-pasukan operasi G-30-S. baik kedalam pasukan Pasopati, Bimasakti dan Pringgadani.

#### **4. 5.2 Penggunaan Fasilitas AURI**

Dalam aksi G-30-S, terdapat bukti-bukti yang memberatkan AURI karena penggunaan beberapa fasilitasnya, meliputi: Penggunaan PN Aerial Survey (Penas) serta persenjataan dan truk AURI di Desa Lubang Buaya.

Pada malam 30 September hingga 1 Oktober, gedung Penas yang letaknya dipinggir jalan *By Pass* Jakarta-Timur telah digunakan sebagai pusat komando oleh para pelaku G-30-S. Diantara tokoh G-30-S yang memantau jalannya operasi dari Penas antara lain Kol. Latief, Letkol Untung dan Sjam. Sesudah berlangsungnya operasi pada dini hari, gedung Penas ditinggalkan untuk selanjutnya beralih ke Pangkalan AURI Halim.

Melihat letaknya, Gedung Penas berada jauh diluar Desa Lubang Buaya dan PAU Halim. Adapun isyarat secara tidak langsung mengenai penggunaan gedung Penas oleh G-30-S, sebenarnya sudah tersirat dalam pembicaraan antara Letkol (Udara) Heru Atmodjo dengan Mayor (Udara) Soejono pada tanggal 30 September sekitar pukul 14.00 di Pondok Gede. Soejono tanpa menyebutkan alasannya, mengutarakan bahwa ia akan menggunakan fasilitas AURI, dengan atau tanpa seizin atasan.<sup>55</sup> Rupanya, salah satu fasilitas yang dimaksud Soejono

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004; Wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang 22-06-2003.

kepada Heru Atmodjo adalah gedung Penas. Namun, sebagai seorang anggota AURI dan juga pengatur jalannya gerakan. Soejono tidak pernah melakukan permintaan kepada MBAU untuk menggunakan gedung Penas. Soejono menggunakan Penas sebagai salah-satu fasilitas AURI dalam fungsinya sebagai pengatur gerakan G-30-S, diluar koordinasi AURI sebagai suatu institusi. Namun demikian, tidak adanya upaya mencegah penyalahgunaan fasilitas AURI merupakan pertanda bahwa AURI tidak berkeberatan terhadap maksud Soejono.

Penggunaan fasilitas persenjataan dan truk AURI didapatkan Kostrad ketika diadakan penyisiran daerah Desa Lubang Buaya pada 3 Oktober untuk mencari jejak-jejak pelaku G-30-S dan hilangnya para jenderal. Di Desa Lubang Buaya, Kostrad menemukan sebuah truk *Ziel* buatan Soviet berwarna biru, milik resimen PPP dan sejumlah peluru kaliber 7,62 mm dalam peti logam berwarna hijau zaitun yang bertuliskan AURI berwarna kuning.<sup>56</sup> Di Istana Bogor, Mayjen Soeharto kemudian menunjukkan bukti tersebut kepada Presiden Sukarno, Men/Pangau Omar Dani serta Komodor Leo Wattimena.

Penemuan barang bukti di atas, berhubungan dengan pertemuan Mayor (Udara) Gathut Sukrisno, seorang pelaku militer G-30-S, menjelang 1 Oktober. Gathut ketika itu menghadap Kolonel (Udara) Wisnoe Djajengmihardo, Komandan PAU Halim, dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam 3000 pucuk senjata yang sebagian besar senjata itu berupa *Chung* atau senapan jenis 556 SKS buatan RRC. Namun, permintaan Ghatut tersebut di tolak Kolonel

---

<sup>56</sup> Aristides, *Op.Cit.*, hal.181

Wisnoe. Setelah permintaan Gathut ditolak, gudang senjata AURI di daerah Mampang dibongkar secara paksa oleh anggota resimen PPP.<sup>57</sup> Waktu pembongkaran ditulis secara berbeda oleh dua sumber. Keterangan buku putih sekretariat negara menulis pembongkaran terjadi pada dini hari 1 Oktober, sedangkan buku Menyingkap Kabut Halim menyebutkan pada pukul 02.00 WIB 2 Oktober.<sup>58</sup>

Adanya pembongkaran merupakan bukti langsung tidak terkaitnya AURI dalam bantuan fasilitas kelompok G-30-S. Jika AURI ikut terlibat dalam G-30-S, maka AURI tidak perlu melakukan pembongkaran secara paksa terhadap gedung senjatanya sendiri. Selain itu, waktu terjadinya pembongkaran juga terkesan ganjil. Dalam versi AURI pembongkaran terjadi pada 2 Oktober, ketika G-30-S sudah dipastikan mengalami kegagalan.<sup>59</sup> Apabila versi yang benar adalah versi buku-putih, maka tujuannya adalah untuk membantu operasi penculikan jenderal. Hal yang menjadi pertanyaan, mengapa G-3-S yang dipimpin Komandan Resimen Cakrabirawa, Letkol Untung menggunakan fasilitas AURI yang mencolok, tidak menggunakan fasilitas AD atau Cakrabirawa.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 216. Ashadi Tjahjadi menyebut tindakan ini dilakukan Sujono. Lihat. Imran Hasibuan Dkk, *Op.,Cit.*, hal 113.

<sup>58</sup> Sekretariat Negara, *Op.Cit.*, hal. 103. Aristiddes, *Op. Cit.*, hal. 216.

<sup>59</sup> Dalam sumber Setneg, tidak disebutkan asal sumber dari mana. Sedangkan dalam kesaksian Ghatut di depan Mahmillub Untung, peristiwa ini tidak dijelaskan. Sumber AURI berdasarkan sumber lisan yang dapat melengkapi kekosongan sumber sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Adapun G-30-S, pada malam 1 Oktober tokoh-tokoh pentingnya sudah menyingkir keluar kota. Hal ini karena G-30-S tidak mendapatkan dukungan presiden Sukarno, terlebih saat itu juga RRI dan Telkom sudah berhasil dikuasai RPKAD.

Terpenting dari interpretasi di atas, penemuan truk dan peluru AURI di Desa Lubang Buaya sendiri adalah sebuah keanehan, karena bukti yang demikian penting ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku gerakan sesudah mengubur jenderal. Padahal seharusnya, truk masih dapat digunakan secara efektif untuk membantu pelaksanaan kudeta di pusat kota Jakarta. Hal ini juga bertolak belakang dengan mayat jenderal, yang mereka kuburkan dengan sangat rapi, dalam sebuah sumur tua yang disamarkan dengan tumpukan daun. Sangat mungkin bahwa ditinggalkannya bukti-bukti ini, dilakukan secara sengaja untuk mendiskreditkan AURI. Bukan juga tidak mungkin, jika benar pembongkaran dilakukan pada tanggal 2 Oktober. Berarti pembongkaran itu dilakukan bukan untuk pelaksanaan G-30-S, tetapi untuk membuktikan keterlibatan AURI.

#### **4. 5.3 Para Perwira yang Terlibat**

Dalam G-30-S memang terdapat oknum AURI ikut terlibat sebagai pelaku G-30-S, meliputi: Mayor (Udara) Soejono dan Gathut Sukresno. Mayor (Udara) Soejono terlibat aktif sejak perencanaan hingga pelaksanaan operasi. Diantaranya ia bertanggung jawab terhadap pelatihan di Desa Lubang Buaya, penggunaan fasilitas Penas dan penyediaan logistik bagi gerakan. Sedangkan Gathut Sukresno bertindak sebagai komandan pasukan Pringgadani yang bertugas menerima dan kemudian membunuh perwira AD yang masih hidup atas perintah Mayor (Udara) Soejono. Menurut *Cornell Paper*, hubungan antara kelompok Untung dengan

beberapa perwira AURI terjadi melalui kontak yang berlangsung pada saat operasi gabungan di Irian Barat atau juga melalui unit PGT.<sup>60</sup>

Keikutsertaan Soejono maupun Gathut tidak di bawah koordinasi formal AURI, melainkan di bawah kedudukannya sebagai Cenko dan Komandan Pringgadani yang dibentuk sebagai perlindungan terhadap jalannya revolusi dan pengamanan presiden. Namun sebagai seorang perwira yang taat terhadap pemimpin, keikutsertaan mereka juga dilandasi keyakinan bahwa gerakan tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Sukarno dan Men/Pangau Omar Dani. Mengenai keyakinan ini Soejono mengatakan sebab-sebabnya:

“ Letnan Kolonel UNTUNG tidak hanya tanggal 6 September tetapi juga pada tanggal 12/13 September selalu mengatakan kepada saya bahwa Jang Mulia Menteri/Panglima Angkatan Udara telah tahu didalam soal ini, juga diinjatkan bahwa Pemimpin Besar Revolusi BUNG KARNO telah mengetahui tentang gerakan apa yang dinamakan olehnja Dewan Djenderal juga didalam usahanja untuk membudjuk saja atau dengan tipu muslihatnja selalu memberikan pujian-pujian jang berlebih-lebihan kepada J.M Menteri MEN/PANGAU OMAR DHANI waktu itu”.<sup>61</sup>

Dengan demikian, keikutsertaan Soejono disebabkan bujukan Letkol Untung. Soejono yakin dan percaya akan ajakan Untung, karena Untung meyakinkan bahwa setiap rencana gerakannya telah diketahui oleh presiden dan juga Men/Pangau. Tentunya, alasan tersebut sangat sukar dibantah oleh perwira yang *progressif revolutioner* dan mengikuti presiden *tanpa reserve*. Maka dapat disimpulkan, bahwa keterlibatan Soejono adalah karena kepercayaan yang

---

<sup>60</sup> Benedict R. Anderson and Ruth T. Mc Vey, *Op.Cit.*, hal.10

<sup>61</sup> Kesaksian Supardjo: Mahmillub Untung, *Op. Cit.*, hal. 91-92

berlebihan kepada Untung serta ia tidak memeriksa ulang kebenaran informasi yang disampaikan Untung.

Keyakinan Soejono ini kemudian juga menyeret bawahannya, Gathut Sukrisno, untuk terlibat dalam operasi G-30-S. Dengan demikian, runutan keikutsertaan para perwira AURI dalam G-30-S, tidak lepas dari kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap Soejono. Namun, patut dipahami, ketika berlangsung operasi tersebut Soejono bertindak dalam kapasitasnya sebagai pasukan G-30-S, bukan anggota AURI. Sebagai contoh mengenai keterlepasan AURI dan sistim komando Soejono, dalam Mahmillub Gathut Sukresno memberikan kesaksian bahwa keikutsertaannya dalam G30-S adalah penugasan "dari ex. Major udara Sujono dalam kedudukannya sebagai anggota CENKO, sebagai Komandan Komando Tjadangan Tempur yang berada di Pasar Rebo Lubang Buaya".<sup>62</sup>

Adapun Men/Pangau Omar Dani, Heru Atmodjo, Suwardi, Susanto dan Anis Sujatno keterlibatannya hanya bersifat dugaan dan prasangka. Hal ini sebagai akibat sangkut pautnya mereka dalam bagian-bagian gerakan. Anis, Susanto dan Suwardi keterlibatannya hanya dilihat sebatas pemberian logistik terhadap gerakan yaitu penggunaan rumah mereka.

Dugaan keterlibatan Omar Dani dimulai dari berbagai kebijakannya sebelum terjadi G-30-S yang dinilai mendukung pelaksanaan G-30-S. Hal ini meliputi pandangannya yang menyetujui terbentuknya Angkatan Kelima serta pelaksanaan Operasi Utuh untuk mengamankan presiden. Pada saat terjadinya G-

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 67-68

30-S, Omar Dani terlibat karena keberadaannya di Halim pada 1 Oktober serta surat perintah hariannya pada 1 Oktober 1965 yang mendukung G-30-S.

Dalam biografi sekaligus *pledoinya*, Omar Dani menjelaskan mengenai persoalan Angkatan Kelima. Omar Dani menyebutkan bahwa persetujuannya tentang angkatan kelima adalah bukan membentuk angkatan baru, melainkan untuk memenuhi kebutuhan militer yang didasarkan ketetapan struktur pertahanan, skema pertahanan rakyat.<sup>63</sup> Terhadap operasi utuh, Omar menegaskan bahwa operasi ini dilakukan semata-mata untuk melindungi jalannya revolusi dan presiden.<sup>64</sup> Namun, dukungan-dukungan Omar Dani menjelang G-30-S secara politik dapat dilihat sebagai upaya menguatkan kampanye PKI dalam menggalang dukungan dari Angkatan Bersenjata. Apalagi pada isu yang sama, angkatan lain lebih jauh hati-hati dalam memandang suatu persoalan politik.

Hal yang memperberat dakwaan Men/Pangau Omar Dani adalah sikapnya pada 1 Oktober 1965. Omar tidak melaporkan informasi yang didapat dari intelnya kepada Presiden Sukarno, mengirimkan helikopter untuk menjemput Supardjo, membuat surat pernyataan dukungan terhadap G-30-S serta menerbangkan pesawat untuk DN Aidit ke Yogyakarta. Sangat sulit untuk melihat rangkaian sikap Omar Dani sebagai sebuah kebetulan. Namun, persoalan penting adalah kepada siapa dukungan Omar ditujukan, apakah kepada G-30-S yang dikoordinir PKI atau G-30-S yang dimengerti sebagai suatu gerakan

---

<sup>63</sup> Omar Dani, *Op.Cit.*, hal. 39. Omar Dani menyamakan konsep rakyat dipersenjatai tersebut kira-kira sama dengan rakyat terlatih pada era Presiden Habibie.

<sup>64</sup> Mahmillub Dr. Subandrio, *Op.Cit.*, hal. 156.

menyelamatkan presiden. Tentunya pertanyaan ini adalah persoalan yang sukar dijawab.

Adapun dugaan keterlibatan Heru Atmodjo didasarkan pada tiga dugaan. Pertama, Heru Atmodjo dianggap mengetahui perencanaan G-30-S seperti dalam rincian laporannya kepada Men/Pangau Omar Dani. Kedua, keberadaan Heru Atmodjo bersama tokoh G-30-S, Brigjen Supardjo di Istana Merdeka, di Penas dan Pangkalan AURI Halim pada 1 Oktober. Ketiga, Heru Atmodjo dianggap terlibat lewat bukti penanda-tanganan statement G-30-S dan kedudukannya sebagai wakil ketua dalam daftar Dewan Revolusi G-30-S yang disiarkan lewat RRI.

Dalam buku pembelaannya yang terbit pada tahun 2004, Heru Atmodjo menyampaikan informasi bahwa keberadaannya bersama Supardjo adalah suatu kebetulan dalam kapasitasnya sebagai intel AURI, sama seperti Omar Dani, kiranya kebetulan yang berkelanjutan sulit untuk diterima. Coen Holtzappel, seorang penulis asing, bahkan menyebutkan bahwa Heru Atmodjo adalah dalang G-30-S.<sup>65</sup> Coen melihat adanya upaya intelejen yang dipimpin Heru Atmodjo, terutama karena dialah perwira intel yang keterlibatannya baru terlihat saat terjadinya G-30-S. Hal ini dipandang sebagai kerja khas operasi intelejen. Hal

---

<sup>65</sup> Coen Holtzappel, *The 30 September Movement: A Political Movement of the Armed Forces or an Intelligence Operation?*, (Journal of Contemporary Asia, 9 (2), 1979), hal. 216-239. Menurut Asvi Warman Adam, kapasitas keilmuan Coen dikalangan sejarawan eropa tidak terlampau dihargai, para ilmuwan eropa menganjurkan agar keterangan Coen tidak usah didengarkan. Heru Atmodjo sendiri akhirnya menulis jawaban tudingan Coen berupa kesaksiannya terhadap G-30-S dalam bukunya berjudul: *Gerakan 30 September 1965; Kesaksian Letkol (Penerbang) Heru Atmodjo*, (Jakarta: ISAI, PCE dan Hasta Mitra, 2004).

yang menguatkan keterlibatan adalah tanda-tangannya dalam naskah testamen politik G-30-S yang kemudian disiarkan R.R.I. Di hadapan Mahmilub, Heru Atmodjo tidak menyangkal kebenaran penanda-tanganannya tersebut.

“saja siang tanggal satu itu menandatangani suatu naskah. Pada waktu itu saja kembali mengantar djenderal SUPARDJO menghadap Panglima Tertinggi di Halim, kemudian menudju kerumah Sersan Udara SUJATNO, lalu waktu itu kami sedang lelah, datang Major Udara SUJONO menjodorkan pada kami satu naskah, naskah itu kalau tidak keliru isinja DEKRIT. Saja tidak membatja lebih dari satu kali DEKRIT itu. Sesudah Major SUJONO itu mengatakan kepada saja jaitu. „Pak HERU ATMODOJO dulu tanda tangan”. Dimana tempat tanda tangan? „Disebelah” ini, ada tempatnya disebelah kiri”. Lalu saja pada waktu itu tidak pandjang lebar memikir, saja tanda tangani.<sup>66</sup>

Namun dalam kesaksian Heru Atmodjo yang baru, ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan penandatanganan apapun mengenai dekrit yang dikeluarkan Dewan Revolusi G-30-S. bahkan ia berkeyakinan bahwa tanda-tangannya telah dipalsukan oleh orang lain.<sup>67</sup> Lebih lanjut Heru Atmodjo mempertanyakan kebenaran Letkol Heru dalam “Dewan Revolusi” adalah dirinya, karena di AURI ada beberapa nama Heru. Seharusnya apabila nama yang ditulis adalah dirinya, maka tulisannya adalah Letkol (Penerbang) Heru Atmodjo.

---

<sup>66</sup> Kesaksian Heru Atmodjo: Mahmilub Untung, *Op. Cit* , hal.75.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Heru Atmodjo 09-06-2004 dan 07-09-2007. Keterangan Heru di atas lebih bersifat mengaburkan fakta, karena tanpa menyebut nama belakang Atmodjo dan titel pnerbang-pun dapat diketahui bahwa nama Heru yang dimaksud adalah dirinya. Apalagi dalam G-30-S, hanya terdapat satu orang yang bernama Heru berpangkat Letnan Kolonel Angkatan Udara, yakni Heru Atmodjo.

**BAB V**  
**AKHIR SEBUAH TRAGEDI:**  
**AURI ANTARA G-30-S DAN SUPERSEMAR**

Peristiwa G-30-S menimbulkan kegoncangan konstelasi politik di Indonesia. Semua unsur-unsur kenegaraan yang tadinya tunduk-patuh *tanpa reserve* di belakang kebijakan presiden, mulai tampak memutar haluan. Perubahan ini didasarkan adanya dugaan kuat, bahwa Presiden Sukarno berada dipihak G-30-S yang didasarkan bukti keberadaan Presiden di Halim yang dianggap sebagai markas G-30-S, serta pernyataan presiden bahwa kejadian pada 1 Oktober 1965 hanyalah “sebuah riak dalam gelombang samudera revolusi” sehingga terkesan membela G-30-S.<sup>1</sup>

Setelah berhasil mengalahkan pasukan G-30-S dan menguasai kembali daerah-daerah penting Ibukota, AD di bawah pimpinan Mayjen Soeharto mengeluarkan informasi lewat Radio Republik Indonesia (RRI) bahwa G-30-S adalah gerakan kontra-revolusioner. Informasi yang dimonopoli AD, baik lewat RRI, TVRI maupun surat kabar Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata menuduh keberadaan PKI dibalik aksi G-30-S. Kampanye AD secara efektif berhasil membangun dukungan masyarakat untuk menghancurkan G-30-S dan juga PKI. Melihat realitas politik yang memberi peruntungan kepada Kostrad, maka pihak-pihak yang tadinya cenderung bersikap menyetujui atau mendukung secara tak langsung G-30-S, seperti AURI, PNI dan Soebandrio lebih memilih untuk bersikap

---

<sup>1</sup> *Pikiran Rakyat*, 7 Oktober 1965.

jauh lebih hati hati. Apalagi tindakan penghancuran terhadap G-30-S, terbukti tidak hanya berimplikasi langsung terhadap para pelaku lapangan G-30-S, tetapi juga seluruh anggota dan simpatisan PKI yang diduga menjadi “otak intelektual“ peristiwa tersebut. Lebih lanjut, ketika proses penghancuran G-30-S tidak lagi terkendali, pihak-pihak yang diduga memiliki kecenderungan “kiri” juga ikut dihancurkan.

Tentu saja, AD tidak secara langsung memiliki keberanian untuk menuduh presiden sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam G-30-S, mengingat masih kuatnya pengaruh presiden. Namun, Kostrad berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi pengaruh presiden, seperti pembatasan ruang gerak presiden dengan alasan keamanan. Usaha ini terbukti cukup efektif untuk mengurangi kontra-kampanye yang mungkin dilakukan presiden. Setidaknya hal tersebut terlihat dari kenyataan, bahwa tidak tersebarluaskannya pidato-pidato presiden seperti pada masa-masa sebelumnya. Sangat dimungkinkan, apabila pidato presiden Sukarno yang garis besar isinya merupakan upaya mempertahankan koalisi Nasakom didengar oleh masyarakat luas, maka upaya penghancuran G-30-S akan mendapatkan hambatan.

Dengan demikian kondisi perpolitikan nasional semakin menunjukkan kecenderungan berkurangnya pengaruh presiden dan munculnya kekuatan baru, yakni AD, sehingga mengakibatkan munculnya kekuasaan kembar di Indonesia. Secara tidak langsung hal tersebut melahirkan problema tersendiri bagi kelompok loyalis presiden dalam menentukan sikapnya, apakah harus menyesuaikan dengan situasi politik yang sedang berkembang atau tetap mempertahankan secara konsisten loyalitasnya kepada presiden.

### **5. 1. Hari-hari Terakhir Kepemimpinan Omar Dani**

Dalam peristiwa G-30-S, Men/Pangau Omar Dani dicurigai memiliki sikap mendukung G-30-S. Omar yang malam 1 Oktober berada di hanggar Pangkalan AURI Halim, pada pagi 1 Oktober membuat surat pernyataan sikap bahwa AURI sebagai alat revolusi mendukung usaha pembersihan dalam tubuh AD yang hendak membahayakan jalannya Revolusi Indonesia. AURI menilai G-30-S yang dipimpin Letkol Untung adalah gerakan penyelamatan presiden dan Revolusi Indonesia dari rencana kudeta Dewan Jendral yang didalangi oleh aksi subversi asing. Dengan demikian, AURI memberi dukungannya terhadap pembunuhan perwira AD di Jakarta dan Yogyakarta oleh G-30-S.

Pada tanggal 30 September 1965 malam telah diadakan gerakan oleh Gerakan 30 September untuk mengamankan dan menjelamatkan Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi terhadap subversi C.I.A. Dengan demikian telah diadakan pembersihan dalam tubuh Angkatan Darat dari pada Anasir<sup>2</sup> yang didalangi oleh subversi asing dan yang membahayakan Revolusi Indonesia.

AURI sebagai Alat Revolusi selalu tetap akan menjokong dan mendukung tiap gerakan yang progressif revolusioner. Sebaliknya AURI akan menghantam tiap usaha yang membahayakan Revolusi Indonesia.<sup>2</sup>

Pembuatan surat perintah di atas berdasarkan saran dari intel AURI, Letkol Heru Atmodjo serta informasi Mayor (Udara) Soejono dan siaran RRI pada pagi hari 1 Oktober 1965. Dengan demikian sumber informasi yang didapatkan berasal dari kelompok G-30-S secara sepihak. Sebagai pimpinan tertinggi AURI, Omar Dani tidak berusaha memastikan kebenaran informasi yang didapatnya.

---

<sup>2</sup> Kutipan dari hasil Mahmillub Dr. Subandrio, ketika Omar Dani dihadirkan sebagai saksi. Lebih lanjut Lihat Lampiran 6

Namun demikian, surat perintah yang dibuat Omar Dani perlu mendapatkan perhatian khusus. Bukti yang ditemukan peneliti dalam Mahmilub Dr. Subandrio akan membantu dalam menginterpretasikan sikap Omar yang sebenarnya. Dalam surat lampiran hasil Mahmilub tersebut, peneliti melihat terdapat perbedaan dengan surat yang sama dan disebarluaskan oleh buku-buku yang berkaitan dengan G-30-S. Lembaran surat perintah yang peneliti temukan menggunakan kepala surat Kepala Staf Mandala Siaga, bukan Markas Besar AURI. Hal ini merupakan suatu hal yang ganjil dan juga penting.

Penggunaan Kepala Surat Staf Mandala Siaga memberi suatu petunjuk bahwa Omar Dani tidaklah terlibat dalam aksi perencanaan G-30-S. Dukungan Omar terhadap G-30-S seperti yang tertulis dalam surat tersebut, lebih merupakan suatu tindakan responsif akan kebenaran informasi yang telah Omar dapatkan dari intelnya Heru Atmodjo. Omar Dani yang percaya kebenaran laporan intelnya, secara tergesa-gesa membuat surat perintah tersebut untuk menunjukkan dukungannya terhadap G-30-S tanpa mempedulikan kondisi kertas yang digunakan.

Penggunaan identitas Kepala Staf Mandala Siaga sendiri merupakan suatu keganjilan karena dalam operasi Mandala Siaga Omar Dani tidaklah memiliki kedudukan penting. Satu-satunya perwira AURI yang mendapatkan jabatan tinggi dalam operasi mandala Siaga adalah Leo Wattimena, yang menjadi wakil Mayjen Soeharto.

Menghadapi sumber tersebut, keterangan penulis biografi Omar mungkin sangat berguna untuk menjelaskan latar belakang pembuatan surat tersebut.

1 Oktober 1965, sekitar Pukul 06.00, Men/Pangau dibangunkan oleh ajudan. Selama tiga jam ia terlelap di Markas Koops. Seusai mandi dan tengah duduk bersama Komodor Udara Leo Wattimena di ruang kerja Panglima Koops, barulah ia dilapori oleh ajudan. Katanya: " *Sewaktu bapak masih tidur, mayor udara sujono datang dan bermaksud ingin menghadap bapak. Dua kali ia datang, menjelang Pukul 05.00 dan sebelum pukul 06.00, tetapi saya tolak langsung. Hal ini terpaksa saya lakukan karena bapak berpesan agar tidak dibangunkan sebelum pukul 06.00*". Tepat pukul 07.00 Men/Pangau bersama Pang.Koops mendengar siaran berita dari RRI tentang adanya Gerakan 30 September. Secara spontan ia berpendapat dan berkata: " *Lha kok sama dengan yang dilaporkan oleh Letkol Udara Heru Atmodjo kemarin sore.*" Ia teringat saran Asisten Direktur Intel malam itu. Bila informasi intelejen itu benar-benar terjadi, segera dibuat suatu pernyataan Men/Pangau. Tanpa berfikir panjang lagi, ia langsung meminta kertas dan fulpen untuk menyusun konsep pernyataan. Setelah dikoordinasikan dengan Panglima Koops Komodor Udara Leo Wattimena, konsep itu langsung dikirim ke Departemen Angkatan Udara (Depau) untuk dikonsultasikan kepada DMPO Komodor Udara I Dewanto.<sup>3</sup>

Dengan melihat latar belakang di atas, maka terlihat bahwa surat pernyataan ini bersifat spontan dan mengikuti alur substansi yang disarankan Heru Atmodjo. Sehingga penggunaan kepala surat Staf Mandala Siaga menguatkan aspek spontanitas tersebut. Omar yang spontan, mengambil kertas apapun untuk membuat surat pernyataan sehingga surat tersebut bukanlah surat yang dibuat dan direncanakan secara matang.

Surat perintah yang dibuat Omar Dani melahirkan permasalahan di kalangan AURI, karena isi surat perintah tersebut yang mendukung G-30-S. Apalagi dalam rapat antara Men/Pangau dengan para Deputi serta Pangkoops di Wisma Angkasa pada malam sebelumnya, disepakati bahwa AURI tidak akan mencampuri urusan

---

<sup>3</sup> Benedicta A. Surodjo dan JMV Soeparno, *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku; Pledoi Omar Dani*. (Jakarta: ISAI, 1999). Hal 65-66

AD.<sup>4</sup> Atas dasar kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 2 Oktober Komodor Andoko atas inisiatif Laksda Udara Makki Perdanakusumah mengeluarkan pengumuman yang menyangkal keterlibatan perwira AURI dalam Dewan Revolusi Indonesia. Pengumuman tersebut untuk sementara menentramkan warga AURI.<sup>5</sup> Setelah keluarnya surat Andoko, Omar Dani kemudian mengeluarkan surat perintah ralat bahwa AURI tidak ikut campur dalam G-30-S. Perubahan sikap politik Omar yang terjadi demikian singkat, terkesan merupakan langkah “cuci tangan” atas dukungan Omar Dani terhadap kelompok G-30-S pada 1 Oktober. Apalagi pasca kegagalan G-30-S, Omar Dani bersembunyi di Istana Bogor di bawah perlindungan Presiden Sukarno, seakan melepaskan tanggung-jawab terhadap institusi yang dipimpinnya.

Setelah pasukan G-30-S disekitar Istana Merdeka dikalahkan pasukan Kostrad, pada tanggal 2 Oktober, pasukan Kostrad melakukan upaya pengejaran pasukan G-30-S yang berlindung di pangkalan Halim. AURI mengkhawatirkan kedatangan pasukan Kostrad dapat mengakibatkan terjadinya pertempuran yang membahayakan pangkalan udara. Melihat gerakan pasukan Kostrad, Sri Mulyono Herlambang dan Komodor Dewanto melakukan pembicaraan dengan Sarwo Edhie Wibowo, Komandan RPKAD yang menghasilkan kesepakatan bahwa AURI tidak ingin mengadakan permusuhan antara kekuatan angkatan bersenjata. Pertemuan tersebut membawa pengaruh positif bagi kedua pihak, instalasi militer Halim tidak

---

<sup>4</sup> Imran Hasibuan Dkk, *Loyalitas Tanpa Pamrih: Biografi Marsekal (Purn) Ashadi Tjahjadi* (Jakarta: Q Communication dan Sinar Harapan, 2003), hal. 115.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal . 116.

menjadi arena pertempuran dan pasukan RPKAD langsung ditarik dari PAU Halim untuk mengejar pasukan G-30-S yang melarikan diri ke Lubang Buaya.<sup>6</sup>

Pada tanggal 3 Oktober atas perintah KWOPS seluruh Indonesia, seluruh anggota AURI diperiksa untuk memudahkan pelaksanaan pembersihan dan menghindari kesalah-fahaman. Setelah dibentuk komando pengawasan dan pengusutan, AURI melaksanakan pembersihan terhadap anggotanya yang terlibat G-30-S. AURI kemudian mengambil tindakan tegas pemecatan Mayor Soejono, Mayor Gathut Sukresno dan Letkol Heru Atmodjo, yang dianggap terlibat dalam G-30-S. Kapten Udara Suhartono atas perintah pimpinan AURI kemudian menangkap Mayor Soejono (Komandan resimen PPP AURI) karena diketahui sebagai pendukung utama G-30-S.<sup>7</sup> Dalam struktur kelompok G-30-S, Mayor Soejono memainkan peran penting sebagai komandan-komando pengamanan VIP, anggota Cenko serta pelatihan Pemuda Rakyat dan ormas PKI lainnya di Desa Lubang Buaya.

Setelah secara fisik kekuatan militer G-30-S di Jakarta berhasil dikalahkan, maka kecurigaan keterlibatan PKI dalam aksi pembunuhan jenderal semakin kuat. Pada 6 Oktober 1965, Presiden Sukarno mengadakan sidang kabinet paripurna di Istana Bogor untuk membahas kondisi negara pasca peristiwa 1 Oktober 1965. Sidang tersebut menghasilkan pembagian langkah penyelesaian peristiwa G-30-S

---

<sup>6</sup> Sri Mulyono Herlambang, *Pengabdianku: Hanya Untukmu Negara dan Bangsa*, (Jakarta: R.A Media Specialist, 2000), hal. 103-104.

<sup>7</sup> Markas Besar TNI Angkatan Udara, *Dokumen Sekilas Peristiwa G-30-S/PKI dan Penumpasannya* (Penerbitan sementara), 1972.

dalam dua bidang: bidang politik yang dipimpin presiden, serta bidang militer, teknis dan pemulihan keamanan yang diserahkan kepada Mayjen Soeharto.

Pada 10 Oktober 1965, Omar mengeluarkan surat keputusan No.78 yang berisi penugasan kepada seluruh panglima komando pertahanan pangkalan udara, Pang Koops AURI dan Panglima Korud V untuk mengamankan pangkalan dan persenjataan untuk mencegah kesalahan pemakaian. Surat ini juga berisi permintaan kepada segenap anggota AURI untuk membantu Mayjen Soeharto dalam memulihkan keamanan. Sebagai langkah lanjutan surat keputusan tersebut, maka dibentuklah komando pengamanan Pangkalan AURI Halim yang dipimpin Komodor Leo Watimena. Garis besar tujuan komando ialah mengamankan Pangkalan AURI Halim dan sekitarnya serta bertanggungjawab atas langkah-langkah pembersihan secara efektif terhadap oknum-oknum G-30-S yang bersembunyi di dalam pangkalan.

Untuk menjaga keamanan pangkalan, AURI membentuk pertahanan sektor kompleks yang didukung masyarakat. Pembentukan sektor pertahanan ini merupakan hasil *briefing* para perwira intel wing operasi 001, setelah mencurigai adanya aktivitas G-30-S yang mengadakan sabotase, penculikan dan penyerangan terhadap pejabat AURI. Di samping itu, anggota AURI juga diperintahkan mengadakan patroli disekitar PN Aerial Survey (Penas) dan disekitar Jakarta *by pass* yang berhadapan dengan daerah hukum AURI. Pesawat pembom TU-16 juga dikerahkan AURI untuk

melakukan pengintaian di sekitar daerah Jakarta dan mengamati adanya kemungkinan sabotase dari pasukan G-30-S.<sup>8</sup>

Usaha-usaha Omar Dani untuk mengurangi kecurigaan pihak lain terhadap dugaan keterlibatan AURI dalam G-30-S ternyata belum memuaskan semua pihak. Di kalangan internal AURI, Omar Dani yang terlanjur dianggap sebagai bagian dari komplotan G-30-S bahkan dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap kecurigaan masyarakat luas terhadap AURI. Pada 12 Oktober 1965, beberapa perwira AURI, seperti Suyitno Sukirno dan Rusmin Nuryadin menghadap presiden Sukarno di Istana Bogor dan menuntut agar Men/Pangau Omar Dani dicopot dari jabatannya karena diduga terkait dalam peristiwa G-30-S. Para perwira tersebut meminta kepada presiden agar AURI dipimpin oleh figur yang relatif lebih bersih dari keterkaitan G-30-S. Hal ini dilakukan atas dasar membersihkan nama baik AURI.

Pada tanggal 15 Oktober 1965 lewat SK Presiden No. 358/1965, Omar Dani dibebaskan-tugaskan dari jabatannya sebagai Men/Pangau dan diberikan tugas baru lewat Keppres No. 369 Tahun 1965 sebagai Panglima Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) setingkat jabatan menteri yang bertugas melaksanakan kelanjutan rencana penggantian materiil Angkatan Udara ke negara-

---

<sup>8</sup> Markas Besar TNI Angkatan Udara, *Op.Cit.*, hal.8

negara eropa dan beberapa negara Asia.<sup>9</sup> Omar kemudian digantikan oleh Laksamana Sri Mulyono Herlambang.<sup>10</sup>

## 5.2 Kepemimpinan Sri Mulyono Herlambang

Sebelum menjabat sebagai Men/Pangau, kedudukan Sri Mulyono Herlambang adalah menteri negara yang diperbantukan pada kabinet Dwikora. Dengan demikian ia termasuk jajaran orang dalam istana kepresidenan. Sri Mulyono Herlambang menjabat sebagai pimpinan tertinggi AURI selama enam bulan, sejak 15 Oktober 1965 lewat Surat Keputusan Presiden No.303 Tahun 1965 hingga pengunduran dirinya pada 23 Maret 1966.<sup>11</sup>

Dari 78 surat kebijakan AURI pada masa Sri Mulyono Herlambang, terdapat 8 buah kebijakan yang berkaitan dengan politik. Uraian kebijakan AURI masa kepemimpinan Sri Mulyono Herlambang, dapat dikelompokan tiga kebijakan pokok, yakni kesetiaan AURI kepada Presiden Sukarno, penumpasan G-30-S oleh AURI serta netralisasi dan Konsolidasi AURI Pasca G-30-S.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Surat Perintah No. SPH/112/KOTI/10/1965 yang dikeluarkan pada 14 Oktober 1965. lihat juga *Kompas*, Senin, 18 Oktober 1965. Keputusan ini diperkuat lewat surat penugasan yaitu Keppres No.319 Tahun 1965.

<sup>10</sup> Sri Mulyono Herlambang lahir di Solo pada tahun 1930. ia adalah anak seorang guru di *Volkschool*, ibunya masih terhitung generasi ketujuh Pakubuwana III. Sri Mulyono menapaki karir penerbang pada akhir 1950 di Taloa, Amerika Serikat. Tahun 1960 ia bertugas belajar di Royal Air Force Staff College di Andover, Inggris. Pulang dari Inggris, ia terlibat dalam berbagai tugas, misalnya operasi penumpasan PRRI/Permesta. Sebelum menapaki karier di AURI, Sri Mulyono pernah ikut aktif berjuang dalam Angkatan Muda Indonesia (AMI) pada 1945, menjadi tentara pelajar dan Cie *Strom abteilung* V Slamet Riyadi, Solo pada masa revolusi kemerdekaan. Pada usia 35 tahun, ia ditunjuk menduki jabatan Men/Pangau.

<sup>11</sup> Lihat Sri Mulyono, *Op. Cit.*, hal.106-107.

<sup>12</sup> Mengenai daftar surat kebijakan Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang lihat di Lampiran 7

### 5. 2.1 Kesetiaan AURI Kepada Presiden Sukarno

Dalam surat perintah harian Men/Pangau pada tanggal 1 Oktober maupun pada 3 Oktober, tak diragukan lagi diantara kontroversi substansial yang ada AURI tetap menyatakan institusinya berada di belakang Presiden Sukarno. Penekanan dua isi surat pada kultus-individu Sukarno, memberi isyarat bahwa isi penting surat itu bukan pada siapa yang didukung dalam peristiwa G-30-S. Melainkan pada masalah penegasan sikap bahwa kepada Sukarno kesetiaan AURI diberikan. Hal senada juga kemudian dilontarkan oleh Seskau yang menyatakan kepatuhannya kepada Bung Karno.<sup>13</sup>

Pada tanggal 30 Oktober 1965, sejumlah perwira tinggi AURI yang dipimpin Laksamana Sri Mulyono Herlambang menghadap presiden ke Istana Bogor untuk menyatakan kepatuhan dan ketaatan AURI dalam menumpas G-30-S seperti yang diperintahkan Presiden Sukarno. Sebelum menghadap presiden, pimpinan AURI telah mendukung sepenuhnya pengangkatan panglima Kostrad, Mayjend Soeharto menjadi Men/Pangad, sesuai dengan ketegasan tindakannya dalam menumpas G-30-S.<sup>14</sup>

Menyambut hari pahlawan ke-20 pada tanggal 10 November 1945, Men/Pangau Laksamana Muda (Udara) Sri Mulyono Herlambang menegaskan dalam pidatonya di depan warga AURI, bahwa secara institusi AURI mengutuk aksi G-30-S yang menggoncangkan segi kehidupan bernegara.

---

<sup>13</sup> *Kompas*, Senin, 12 Oktober 1965

<sup>14</sup> *Kompas*, Selasa, 2 November 1965; lihat juga Markas Besar TNI Angkatan Udara, *Op.Cit.*, hal.9

Revolusi adalah satu proses pandjang dari kedjadian jang satu ke kedjadian jang lain dan Revolusi bukan Revolusi kalau tidak ada musuh-musuhnja. Baik musuh itu datangnja dari luar maupun dari dalam, baik dari Nekolim maupun dari golongan kontra-Revolusi di dalam negeri, seperti peristiwa<sup>2</sup> jang timbul dari apa jang disebut “Gerakan 30 September”.<sup>15</sup>

Di samping itu Sri Mulyono juga menegaskan sikap AURI yang tunduk dan patuh terhadap komando Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

“ Pemimpin Besar Revolusi telah mendjelaskan, bahwa Peristiwa 30 September adalah merupakan persoalan politik jang harus diselesaikan setjara politik pula, maka AURI akan selalu mentaati segala perintah maupun komando Bung Karno, untuk memulihkan suasana tenang dan tertib dalam masjarakat, agar beliau seleskasnja dapat menjelesaikan persoalan jang pelik ini ”.<sup>16</sup>

Dengan penegasan sikap tersebut, AURI menegaskan pandangannya bahwa politik AURI adalah politik negara. Sikap politik Presiden Sukarno yang mengutuk aksi G-30-S, membuat AURI juga berpandangan sama. Ketika Presiden menyatakan persoalan G-30-S sebagai persoalan politik yang harus diselesaikan secara politik, maka AURI pun turut menjaganya. Bahkan ketika komando pemulihan keamanan dan ketertiban secara konstitusional diserahkan kepada Kostrad dan Soeharto, AURI pun tunduk.<sup>17</sup>

Pada kesempatan pelantikannya sebagai Men/Pangau pada tanggal 15 Desember 1965, Sri Mulyono mengeluarkan surat perintah harian yang berisikan penegasan sikap AURI untuk menjaga kekompakan dengan rakyat

---

<sup>15</sup> *Angkasa* No.11Tahun XV November 1965 hal 306-307.

<sup>16</sup> *Angkasa* No.11Tahun XV November 1965 hal 306-307.

<sup>17</sup> Lihat artikel berjudul: “AURI siap laksanakan komando presiden dan Menko KSAB”, *Kompas*, Selasa 23 November 1965.

dan alat-alat revolusi lainnya, dalam rangka melaksanakan semua perintah dan komando Bung Karno. Men/Pangau juga menyerukan untuk mempertinggi kesiap-siagaan AURI dalam menyukseskan Dwikora.<sup>18</sup>

Selain kebijakan yang tersebut di atas, dalam penerbitan majalah resmi AURI, *Angkasa* yang terbit sebulan sekali, AURI juga menunjukkan sikapnya sebagai pendukung presiden.<sup>19</sup> Pasca G-30-S, *Angkasa* secara intensif menuliskan dalam majalahnya perihal *Adjaran-adjaran Bung Karno*. Diantaranya yang dapat diketahui dokumentasinya ialah tulisan bagian kedua pada bulan November 1965 dan ketiga Desember 1965 (masih bersambung). Adapun tulisan tersebut, sebelum bulan November belum ada. Secara logika, jika pada bulan November tulisan tersebut sudah sampai bagian kedua, maka dapat dipastikan tulisan mengenai *Adjaran-adjaran Bung Karno* mulai muncul sejak bulan Oktober 1965. Artinya tulisan itu tepat dimulai sesudah peristiwa 30 September.<sup>20</sup> Penulisan *Adjaran-adjaran Bung Karno*, disaat-saat kekuasaannya mulai berkurang akibat peristiwa G-30-S, menunjukkan bahwa AURI masih berada di belakang Presiden Sukarno. AURI tetap bersikap secara profesional dan konsisten, tidak pernah berubah sikap terhadap presiden yang secara konstitusional adalah pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.

---

<sup>18</sup> Hal ini menegaskan bahwa AURI tetap mendukung Konfrontasi Malaysia.

<sup>19</sup> Majalah tersebut masih terbit hingga saat ini dengan nama yang sama.

<sup>20</sup> Mengenai tiadanya dokumentasi sumber *Angkasa* bulan Oktober, sangat mungkin bahwa *Angkasa* terbitan itu tidak dibenarkan untuk terus hidup dan bercerita, atau juga mungkin memang hilang secara tidak disengaja. Kebuntuan sumber seperti ini, telah menjadi cerita yang biasa bagi kalangan sejarawan Indonesia, karena pemerintah kita kurang memiliki kesadaran tentang kebebasan akademik dan *arsip minded*.

## 5. 2.2 Penumpasan G-30-S oleh AURI

Peristiwa G-30-S, telah menimbulkan efek tersendiri bagi AURI. Keterlibatan beberapa oknum AURI didalamnya, mengakibatkan munculnya kesangsian bahwa AURI akan sungguh-sungguh menindak para pelaku G-30-S. Namun, kesangsian terhadap AURI sangat tidak beralasan, ketika ternyata AURI secara aktif bertindak dengan tegas menumpas G-30-S. Hal ini dapat kita telusuri baik lewat kebijakan maupun tindakan dilapangan. AURI juga mempertegas sikapnya untuk tetap menjaga kekompakan ABRI.<sup>21</sup>

Sebagai bagian keluarga besar AURI, persatuan istri AURI (PIA) pada tanggal 17 Oktober 1965 telah mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya berisi dua hal. 1) PIA tidak menganut aliran politik manapun serta tidak tergabung dalam institusi massa apapun dan menyatakan tetap berdiri di belakang kepala negara. 2) PIA mengutuk perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan biadab G-30-S. jika ternyata ada anggota PIA yang tersangkut, maka dengan tegas akan diambil tindakan dan dipecatnya.<sup>22</sup>

Pada tanggal 20 November 1965, bertempat di Departemen AURI telah berlangsung rapat kerja yang dipimpin oleh Men/Pangau Sri Mulyono dan dihadiri oleh para pejabat/pimpinan staff departemen, para panglima komando fungsional dan para panglima regional AURI. Dalam rapat kerja tersebut

---

<sup>21</sup> *Kompas*, Senin, 18 Oktober 1965.

<sup>22</sup> Markas Besar TNI Angkatan Udara, *Op.Cit.*, hal.8

diperoleh beberapa keputusan penting menyangkut implikasi akibat G-30-S, antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan kekompakan AURI, sehingga AURI benar-benar merupakan potensi yang ampuh untuk menghadapi setiap lawan.
- b. Melaksanakan intruksi Menko/Hankam/Kasab untuk mempercepat penertiban/pembersihan personil yang terlibat dalam petualangan dari apa yang dinamakan G-30-S.
- c. Akan segera mengambil tindakan terhadap setiap oknum yang ternyata berdasarkan fakta-fakta/bukti-bukti yang syah terlibat dalam peristiwa G-30-S.
- d. Memupuk saling pengertian dan lebih mengeratkan hubungan, baik antara AURI dengan angkatan bersenjata lainnya, maupun dengan masyarakat.<sup>23</sup>

Keputusan yang dilahirkan rapat kerja tersebut menunjukkan keseriusan AURI dalam menata-ulang institusi AURI pasca G-30-S. Sri Mulyono mengajak kepada seluruh keluarga besar AURI untuk menjaga kekompakannya dalam menghadapi lawan, seperti yang dimaksud pada butir kedua yakni kelompok G-30-S. Pada butir ketiga dan kedua, AURI juga menegaskan diperlukannya langkah konkret untuk membersihkan AURI dari oknum yang terlibat G-30-S. Sedangkan dalam butir keempat, AURI menegaskan keberadaannya yang berada pada pihak yang sama dengan institusi militer lainnya untuk menghadapi G-30-S. Hal ini penting mengingat selama ini hubungan antara AURI dengan angkatan lain kurang harmonis. Apalagi pada pidato Mayjen Suharto di awal oktober 1965, AURI tidak disebutkan melakukan kerjasama seperti yang dilakukan angkatan lainnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.9

Pada tanggal 20 Oktober 1965, komando pengusutan AURI mengeluarkan pernyataan bahwa menurut penyelidikan yang telah diadakan secara seksama, Pasukan Gerak Tjepat (PGT) tidak terlibat G-30-S. Pernyataan tersebut kemudian disiarkan dan disebarluaskan untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap PGT AURI sebagai abdi masyarakat yang berlandaskan falsafah pancasila dan sapta marga.<sup>24</sup> Adapun Komando pengusutan AURI kemudian dibentuk pada tanggal 22 Oktober 1965 yang terdiri dari gabungan polisi AURI, PGT AURI, pasukan cadangan dan intel AURI. Selain melakukan pengusutan terhadap PGT, komando ini juga melakukan sensus senjata/amunisi anggota Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP). Hal ini diperlukan karena keterlibatan Komandan Resimen PPP, Mayor Soejono dalam G-30-S. Dengan pengusutan, maka dapat diketahui jumlah senjata/amunisi yang telah disalahgunakan serta anggota PPP yang terlibat dalam G-30-S.<sup>25</sup> Dengan demikian, upaya ini merupakan suatu langkah tegas kesungguhan AURI dalam membersihkan institusinya dari pengaruh G-30-S.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan tindakan pembersihan ke dalam tubuh tiap angkatan dari oknum-oknum G-30-S, Men/Pangau Sri Mulyono bersama Men/Pangad, Men/Pangal dan Men/Pangak telah mengikuti rapat yang dipimpin langsung Menko Hankam/Pangab Jenderal A.H Nasution pada tanggal 16 November

---

<sup>24</sup> *Kompas*, Jum'at 22 Oktober 1965.

<sup>25</sup> Markas Besar TNI Angkatan Udara, *Op.Cit.*, hal. 9

<sup>26</sup> *Kompas*, Selasa, 26 Oktober 1965 lihat juga artikel yang cukup menarik berjudul "AURI siap tumpas G-30-S" di *Kompas*, Senin, 15 November 1965.

1965. Dalam rapat koordinasi tersebut dibuat keputusan bersama tentang beberapa kebijaksanaan dalam rangka penumpasan G-30-S, sisa-sisa kekuatan G-30-S serta kekhawatiran terhadap hasutan serta isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik antar angkatan. Agar kebijakan yang diputuskan dapat berlangsung secara efektif, maka digariskan petunjuk-petunjuk/pedoman-pedoman tertentu guna menghindari hasutan yang membahayakan persatuan dan kesatuan ABRI.<sup>27</sup>

Pada 24 November 1965, Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang mengeluarkan Intruksi Men/Pangau No.12 yang merupakan tindak lanjut AURI terhadap rapat 16 November sebelumnya. Intruksi tersebut menyerukan agar seluruh warga AURI secara intensif melaksanakan pembersihan dalam komando-komando terhadap oknum-oknum dan unsur-unsur G-30-S. Selain itu juga diintruksikan untuk mengambil segala macam tindakan atau langkah-langkah yang positif terhadap keluarga/purnawirawan AURI yang terlibat petualangan G-30-S. Agar dapat mempertanggung-jawabkan hasil kerja AURI, tidak lupa Men/Pangau juga berpesan untuk membuat laporan secara intensif hasil kerja pembersihan tersebut. Dengan demikian, maka akan diketahui secara empiris warga AURI yang memiliki keterlibatan dengan G-30-S.<sup>28</sup>

Pada hari yang sama, Men/Pangau juga mengeluarkan Intruksi No.13 yang isinya tidak berbeda dengan intruksi sebelumnya yaitu sikap AURI agar

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 10.

<sup>28</sup> Lihat Lampiran 8

secara intensif melaksanakan pembersihan terhadap oknum AURI yang terlibat dalam G-30-S dan pesan untuk melaporkan hasil tindakan/langkah yang diambil dalam proses tersebut.<sup>29</sup> Dengan demikian keluarnya dua intruksi dengan substansi sama dapat diartikan sebagai langkah keseriusan AURI melakukan pembersihan institusinya dari anasir G-30-S. Lewat Instruksi Men/Pangau No.14 yang ditetapkan pada 24 November 1965, secara teknis AURI akan membentuk team-team pembantu khusus dalam pelaksanaan penertiban/pembersihan personil AURI dari unsur-unsur G-30-S.<sup>30</sup>

Pada tanggal 7 Desember 1965, Men/Pangau Laksamana Sri Mulyono Herlambang juga mengeluarkan radiogram mengenai pengusutan/penangkapan oknum-oknum yang tersangkut G-30-S.<sup>31</sup> Berdasarkan hal tersebut, Komodor Udara Sujitno Sukirno, Panglima Kohanud, telah mengambil tindakan tegas dan memecat dengan tidak hormat Mayor Udara Ir. Subagijo yang diduga terlibat dalam G-30-S karena membantu menyembunyikan/memberikan perlindungan kepada tokoh PKI yang sedang menjadi buronan ABRI. Penangkapan serta pemecatan oleh panglima Kohanud itu sesuai dengan pelaksanaan instruksi Menko Hankam/KASAB No.10.5/1965 yang telah dikeluarkan beberapa hari sebelumnya. Walaupun yang mengambil langkah pemecatan adalah Komodor Sukirno, tetapi hal ini mencerminkan sikap tegas institusi AURI.

---

<sup>29</sup> Lihat Lampiran 9

<sup>30</sup> Lihat Lampiran 10

<sup>31</sup> Hal ini merupakan langkah operasional dari instruksi sebelumnya dan menegaskan sikap AURI yang sama dengan sikap angkatan lain.

Menindak-lanjuti Keputusan Presiden No. 358 tahun 1965, Keputusan Menko Hankam/KASAB No M/B/236/1965 dan Instruksi Menko Hankam/KASAB No. Ins-1015/1965, maka lewat Instruksi Men/Pangau No.17, AURI membubarkan institusi cabang Serikat Buruh Kementerian Pertahanan (SBKP) AURI, yakni Serikat Buruh Angkatan Udara (Serbaud). Lewat instruksi tersebut Men/Pangau juga memerintahkan melakukan tindakan pembersihan anggota AURI yang menjadi anggota serikat tersebut dan organisasi politik/organisasi masyarakat kontra revolusi lainnya.<sup>32</sup> Pelaksanaan instruksi ditujukan kepada seluruh panglima komando Korud, komandan pangkalan, direktur LAPIP dan direktur Aerial Survey. Dalam instruksi ini juga diperintahkan untuk menertibkan anggota AURI yang terlibat PKI. Selain itu apabila ada anggota atau keluarga AURI yang menjadi anggota PKI atau organisasi se-azas, maka ia harus membuat pernyataan tertulis telah keluar dari organisasi tersebut, mengutuk G-30-S dan taat berdiri di belakang Presiden Sukarno. Setelah itu mereka diperintahkan untuk mengikuti kursus indoktrinasi secara intensif, sebagai cara pembinaan mental agar kembali tidak salah arah. Dengan demikian, langkah ini memiliki makna penumpasan G-30-S dan PKI serta solusi konkrit untuk pembinaan mental anggota AURI yang memiliki hubungan keanggotaan PKI dan ormas-ormasnya.

---

<sup>32</sup> Dokumen kebijakan Sri Mulyono Herlambang. Lebih lanjut lihat juga Alex Dinuth, *Dokumen Terpilih G.30.S/PKI*, (Jakarta:Intermasa, 1997), 190-194.

Sangat jelas, seluruh deretan kebijakan di atas bercirikan pada dua hal pokok. *Pertama*, AURI sebagai institusi militer dan alat negara turut serta dalam upaya memulihkan keamanan dan ketertiban nasional. Upaya ini menjadi prioritas dalam penegasan sikap AURI terhadap G-30-S, karena dilakukan secara berulang-ulang. Secara umum, penegasan ini adalah upaya AURI membangun kepercayaan masyarakat bahwa AURI bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan negara. AURI telah bersikap profesional sebagai alat negara, lepas dari kepentingan politik praktis. *Kedua*, AURI memiliki tingkat ketaatan yang tinggi terhadap pemimpin secara konstitusional. Pembubaran SBKP dalam AURI merupakan kebijakan turunan dari Koopkamtib untuk membersihkan keberadaan kelompok G-30-S yang diduga bersembunyi dibalik berbagai organisasi. Walaupun secara pribadi Sri Mulyono atau AURI belum mengeluarkan statement bahwa PKI berada dibalik G-30-S, tetapi AURI instruksi atasannya dalam pemulihan keamanan yaitu Mayjen Soeharto yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno, maka AURI dengan komitmen Sapta Marga harus menjalankannya. Dengan demikian, ketaatan AURI tidak didasarkan sebagai ketaatan secara personal, tetapi legal-formal sebagaimana yang telah digariskan konstitusi.

### **5. 2.3 Netralisasi dan Konsolidasi AURI Pasca G-30-S**

Peristiwa G-30-S, menimbulkan masalah tersendiri bagi AURI dalam memandang perkembangan situasi nasional. Hal ini terjadi sebagai akibat dugaan keterlibatan oknum AURI didalamnya, termasuk Men/Pangau Omar

Dani. Kebijakan politik yang diperhatikan Sri Mulyono ketika menjabat sebagai Men/Pangau adalah kebijakan yang dilakukan untuk melakukan upaya netralisasi dan konsolidasi AURI.

Kebijakan dalam kerangka perlindungan ini, terlihat lewat dikeluarkannya Intruksi Men/Pangau No.5 yang ditetapkan pada 10 November 1965.<sup>33</sup> Isi dari kebijakan itu adalah penugasan kepada panglima komando agar hanya menjalankan tugas pokok operasionalnya. Kebijakan ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah cerminan kehati-hatian Sri Mulyono Herlambang dalam menjaga fasilitas institusinya. Pada 1 Oktober 1965, Pangkalan AURI Halim hampir saja menjadi tempat pertempuran antara pasukan G-30-S dan RPKAD. Pasca kejadian tersebut, Men/Pangau Sri Mulyono yang tidak menginginkan terulangnya kejadian serupa, berinisiatif agar pengamanannya diserahkan kepada pihak setempat. Apabila pangkalan dijaga oleh banyak komponen, ditakutkan terjadi ketidakjelasan garis koordinasi dan operasi.

Lewat Intruksi No.7 yang ditetapkan pada 5 November 1965, Men/Pangau membuat aturan operasi pengamanan sebagai akibat dari peristiwa G-30-S.<sup>34</sup> Adapun penanggungjawab operasi pengamanan G-30-S dikoordinasikan oleh panglima Korud masing-masing, apabila dibutuhkan bantuan untuk pembiayaan pelaksanaan operasi maka kebutuhan tersebut langsung diajukan kepada Men/Pangau. Seluruh panglima Korud, kemudian

---

<sup>33</sup> Lihat Lampiran 11

<sup>34</sup> Lihat Lampiran 12

diperintahkan untuk membuat laporan secara periodik mengenai perkembangan situasi akibat peristiwa G-30-S.

Sebagai *follow up* dari pertemuan para petinggi AURI dengan presiden di Istana Bogor, maka diadakan musyawarah AURI pada awal bulan November 1965 dengan tema “Demi Kepentingan Negara dan Revolusi 17 Agustus 1945”. Hasil musyawarah itu ditetapkan antara lain: 1) Angkatan Udara mengutuk sekeras-kerasnya tindakan G-30-S serta dalangnya PKI. 2) Angkatan Udara akan mengambil tindakan positif dan konkrit terhadap desakan dan tekanan-tekanan, baik yang datangnya dari datangnya dari luar maupun dari dalam tubuh AURI. 3) Menjamin keutuhan tubuh AURI dan mengembalikan kewibawaan pimpinan AURI. Hasil musyawarah merupakan suatu langkah untuk menjamin keutuhan dan kewibawaan AURI sebagai bagian integral angkatan bersenjata dalam menumpas G-30-S.

Lewat instruksi Men/Pangau No.10 yang ditetapkan pada 22 November 1965 Men/Pangau meminta agar anggota AURI tidak melakukan wawancara dengan wartawan.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kekompakan AURI serta mencegah timbulnya keterangan yang simpang-siur. Keterangan dari AURI hanya bisa didapatkan lewat Dinas Penerangan berdasarkan petunjuk Men/Pangau. Pada hari yang sama, Men/Pangau mengeluarkan Intruksi No.11 yang berisi perintah untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap desas-desus atau berita-berita yang bersifat

---

<sup>35</sup> Lihat Lampiran 13

fitnahan.<sup>36</sup> Dalam intruksi ini terdapat ketegasan AURI lewat perintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap oknum-oknum di dalam AURI, baik yang dengan sengaja atau tidak telah ikut melancarkan desas-desus atau berita-berita yang berisi fitnah atau provokasi yang dapat merongrong, membahayakan dan merugikan bagi keutuhan/kekompakan AURI.

Selain kebijakan Men/Pangau di atas, Pada hari rabu, tanggal 2 Maret 1966 tercatat pula bahwa Panglima Komando Regional Udara V membuat pernyataan/bantahan terhadap desas-desus yang tidak benar terhadap AURI. Pernyataan bantahan itu meliputi tuduhan:

1. Penembakan 4 orang anggota resimen Tjakrabirawa di Jl. Slipi
2. AURI ikut merencanakan Gerakan 30 September
3. Pembangunan tugu dengan markas besar KORUD V sebagai symbol alat pentjungkil mata G-30-S.<sup>37</sup>

Bantahan ini kembali diperkuat, dengan keterangan AURI/Wing operasional 001 Lanud Halim AURI yang membantah desas-desus yang mendiskreditkan AURI yang meliputi: 1) AURI melatih kemiliteran Pemuda Rakyat di Serang, Banten dan Lubang Buaya. 2) Latihan yang diadakan di Serang, Banten dan Lubang Buaya itu adalah *refreshing* para komando bagi PGT dalam mempertinggi daya tempur AU.<sup>38</sup>

Dari deretan kebijakan *preventif* ini, agaknya AURI menyadari bahwa posisi politiknya tidak lagi seperti dahulu. Hal ini terjadi karena pelindung

---

<sup>36</sup> Lihat Lampiran 14

<sup>37</sup> *Berita Yudha*, 5 Maret 1966.

<sup>38</sup> *Berita Yudha*, 11 Maret 1966.

AURI, Presiden Sukarno, tidak lagi memiliki peran efektif dalam pemerintahan. Dengan demikian, dalam format pola kekuasaan yang baru, AURI menegaskan sikapnya sebagai tentara profesional yang tidak ingin campur tangan terhadap kemelut politik. Sangat wajar jika dalam deret kebijakan AURI pada masa Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang, lebih tampak sebagai upaya menyelamatkan AURI dari citra negatif akibat keterlibatannya dalam peristiwa G-30-S.

### **5. 3. Surat Perintah 11 Maret (Supersemar)**

Sejak kekacauan politik yang muncul pasca G-30-S 1965, pemerintah tidak lagi memiliki kewibawaan dibandingkan masa sebelumnya. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang dipelopori KAMI, seakan tidak pernah surut menyuarakan tiga tuntutan atau yang kita kenal sebagai Tritura yaitu: bubarkan PKI, pembubaran kabinet Dwikora serta penurunan harga. AD bahkan menjamin, selama KAMI beraksi dengan wajar memperjuangkan Trikora maka KAMI pasti didukung ABRI dan seluruh rakyat sampai perjuangan berhasil.<sup>39</sup> Aksi-aksi tersebut, membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membubarkan KAMI pada tanggal 25 Februari 1966. Namun, tekanan terhadap mahasiswa tidak hanya berakhir disini. Dalam kesempatan meninjau kantor Deplu yang dirusak aksi mahasiswa, Sukarno memaki-maki aksi demonstrasi sebagai kontra-revolusi.<sup>40</sup> Pada tanggal 10 Maret 1966 seluruh partai politik dan Muhammadiyah menyatakan sikap mereka terhadap

---

<sup>39</sup> Christiano Wibisono. *Aksi-aksi Tritura*, (Jakarta: Yayasan Management Informasi, 1980), hal. 68. buku ini adalah catatan/kesaksian reportase jurnalistik yang selesai ditulis pada 28 Oktober 1968.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 109

aksi mahasiswa. Isi pokok pernyataan tersebut ialah: “tidak membenarkan cara-cara yang dipergunakan para pelajar, mahasiswa dan pemuda yang akibatnya langsung atau tidak langsung membahayakan revolusi Indonesia dan merongrong kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno”.<sup>41</sup>

Kecaman dari partai politik ini, terbukti tidak berpengaruh terhadap jalannya aksi yang direncanakan pada 11 Maret 1966. Jalan-jalan utama, seperti Cikini, Diponegoro, Hayam Wuruk dan Gajah Mada dikuasai mahasiswa. Terutama sekali jalan yang dikuasai dengan sempurna adalah jalan antara Kimia dengan Salemba. Aksi pada 11 Maret tersebut, bertujuan untuk menggagalkan sidang kabinet yang akan berlangsung.

Seperti yang sudah terjadwal, pada tanggal 11 Maret 1966 kabinet Dwikora mengadakan sidang paripurna di Istana Merdeka untuk membahas situasi nasional dan kebijakan yang akan dilakukan. Karena adanya laporan rencana aksi mahasiswa untuk menggagalkan jalannya sidang, maka pembantu-pembantu presiden mengintruksikan kepada jajaran menteri agar dapat hadir di Istana sebelum jam 06.00.<sup>42</sup> Amir Machmud yang bertanggung jawab terhadap jalannya keamanan di Ibukota, memberi jaminan kepada Sabur bahwa keadaan aman. Berdasarkan jaminan tersebut presiden berangkat dari Istana Bogor dengan helikopter dan sampai di Istana Bogor pada pukul 09.00 WIB.

---

<sup>41</sup> *Berita Yudha*, Jum'at 11 Maret 1966

<sup>42</sup> Pasca G-30-S, hubungan mahasiswa dengan AD tampak begitu mesra. Bahkan lewat komunikasi dengan AD-lah, mahasiswa menjalankan aksinya. Menarik disimak catatan harian mahasiswa UI, Soe Hok Gie, *Catatan seorang Demonstran*, (Jakarta:LP3ES, 1983), hal.159-209.

Pada saat helikopter mendarat di Istana, presiden melihat adanya aksi mahasiswa di depan Istana. Sekali lagi presiden menanyakan kepada Amir Machmud tentang keadaan. Setelah memperoleh jawaban tidak adanya gangguan keamanan dalam bersidang, maka presiden langsung menuju ruang sidang di belakang Istana. Para menteri sudah hadir diruangan, kecuali Men/Pangad Letjend Soeharto dan Menteri Perkebunan Frans Seda, karena keduanya sakit.

Pada awal pidatonya, presiden meminta menteri-menteri agar lebih mengefektifkan tugas yang telah diberikan dan menjaga kekompakan terhadap jalannya revolusi. Presiden juga meminta kepada menteri agar mengakhiri pertentangan politik. Saat pidato Presiden Sukarno berlangsung, ajudan presiden, Brigdjen Sabur mendapat info dari intel Tjakrabirawa mengenai kehadiran pasukan tak dikenal ditengah-tengah aksi mahasiswa. Sabur kemudian mengirimkan nota sebanyak 2 kali kepada Amir Machmud mengenai info yang didapatnya. Amir Machmud tidak beranjak dari tempat duduknya, dan hanya memberi isyarat seakan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, Sabur yang merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan presiden, membuat nota ketiga yang ditujukan langsung kepada presiden. Dalam nota itu ditulis bahwa terdapat pasukan tak dikenal sedang mengepung Istana, bahkan sebagian sudah memasuki pekarangan Istana. Sabur lebih jauh meminta agar presiden meninggalkan sidang.

Setelah membaca nota Sabur, Sukarno kemudian meninggalkan sidang, dengan diikuti Dr. Subandrio dan Chaerul Saleh. Usaha Amir untuk membujuk Presiden Sukarno agar tidak meninggalkan sidang dengan jaminan keamanan, ternyata tidak

berhasil. Presiden bergegas meninggalkan Istana menuju Istana Bogor dengan Helikopter. Jalannya persidangan untuk sementara di *skorsing*, hingga akhirnya ditutup oleh Waperdam Dr. Leimena.

Sesudah sidang kabinet dibubarkan, Basuki Rahmat, M.Yusuf dan Mursyid membicarakan situasi yang baru terjadi. Amir Machmud kemudian datang menggabungkan diri. Dalam pembicaraan tersebut Yusuf mengajak mereka untuk berangkat ke Bogor menemui presiden untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Kecuali Mursyid, perwira lain menerima ajakan itu. Sebelum berangkat ke Istana Bogor, terlebih dahulu mereka melaporkan kejadian di Istana kepada Men/Pangad Letjen Soeharto dan meminta izin menghadap presiden di Bogor. Soeharto yang mendapat laporan, menyetujui rencana keberangkatan ketiga perwira tersebut ke Bogor. Soeharto juga berkenan mengirimkan salam kepada presiden dan menitipkan pesan mengenai kesanggupannya mengatasi keadaan, apabila presiden memberikan kepercayaan kepadanya.

Mereka tiba di Bogor kira-kira pukul 13.00 tanpa mengalami rintangan dari Tjakrabirawa. Karena presiden sedang beristirahat, maka mereka menunggu presiden hingga pukul 14.30. Dalam pertemuan dengan presiden, mereka melaporkan kejadian yang sebenarnya di Istana. Basuki Rachmat sebagai juru bicara mencoba meyakinkan presiden bahwa tidak ada pasukan tak dikenal mengepung istana dan memohon agar presiden tidak merasa ditinggalkan oleh Angkatan Darat. Ketiga perwira ini kemudian menyampaikan pesan Soeharto tentang kesanggupannya mengatasi

keadaan bila presiden memberi kepercayaan. Presiden pun menyetujui usulan Soeharto tersebut.

Akhirnya disusunlah konsep surat perintah tersebut oleh tiga perwira tersebut. Setelah konsep selesai dan dibahas presiden bersama waperdam, akhirnya presiden menyetujui menandatangani draft yang sudah disusun. Surat inilah yang kemudian dikenal luas dengan nama Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret.<sup>43</sup>

#### **5.4 De-Sukarnoisasi dan Pergantian Sri Mulyono Herlambang**

Masa Demokrasi Terpimpin ditandai oleh segitiga kekuatan yang potensial yaitu Sukarno, AD dan PKI.<sup>44</sup> Sebelum G-30-S kedudukan Presiden Sukarno sangat kuat dalam menentukan setiap kebijakan politik nasional, dimana kebijakannya menjadi patron politik setiap kelompok politik yang ingin bertahan dalam demokrasi terpimpin. Namun setelah terjadinya peristiwa G-30-S peta segitiga keseimbangan mulai bergeser, seiring kehancuran PKI yang diduga bertanggung jawab atas terbunuhnya sembilan perwira AD. Segitiga yang terbentuk hanya menyisakan dua petarung, yakni Sukarno dan Angkatan Darat. Namun, sikap politik Presiden Sukarno yang tidak mau membubarkan PKI serta masih adanya orang-orang berhaluan kiri

---

<sup>43</sup> Super-Semmar secara kebetulan adalah singkatan dan juga istilah yang sangat sarat paduan simbolisasi Jawa. Semar menunjuk kepada tokoh punakawan yang menjadi pengasuh pandawa serta senantiasa berlaku bijak dalam setiap tindakan. Ia disebut-sebut cucu Hyang-Ismaya yang menjadi rakyat biasa. Lihat Sri Mulyono, *Apa dan Siapa Semar*, (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal. 33 dan 66. Sukarno sendiri sepanjang hidupnya menggunakan istilah S.P 11 Maret.

<sup>44</sup> Untuk pokok pikiran tiga kekuatan demokrasi terpimpin ini lihat uraian Herbeth Feith, *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1999)

dalam struktur kabinet, seperti Chaerul Saleh, Dr. Subandrio, Ir. Surachman dan Jusuf Muda Dalam justru mengakibatkan melemahnya kedudukan presiden.<sup>45</sup>

Tuduhan terhadap keterlibatan AURI yang merupakan pendukung presiden, merupakan ancaman bagi berkurangnya kekuatan pro-presiden dalam pemerintahan. Sukarno sendiri yang kedudukannya mulai dipertanyakan, berusaha sekuat mungkin membela AURI dari tuduhan tersebut sebagaimana terlihat dalam pidatonya. Namun demikian Sukarno tidak dapat berbuat apa-apa ketika adanya tekanan dari pihak lain agar perwira-perwira AURI yang dinilai loyal kepadanya dibebas-tugaskan. Proses penggantian Men/Pangau Omar Dani dan Sri Mulyono Herlambang tentunya tidak lepas dari kedekatan kedua tokoh tersebut dengan presiden.<sup>46</sup>

Untuk menetralsir kekuatan loyalis di dalam AURI, muncul isu pergantian kepemimpinan AURI dengan perwira yang lebih diterima Angkatan Darat dan lebih netral terhadap kekuasaan Presiden Sukarno. Saat Sukarno dipaksa oleh para perwira muda AURI di Istana Bogor untuk mengganti Omar Dani, Sukarno pada akhirnya mengalah, tetapi Sukarno masih mampu memberikan persyaratan agar pilihannya tidak diganggu gugat.<sup>47</sup> Sukarno kemudian menunjuk perwira yang juga dekat dengannya, Sri Mulyono Herlambang. Ketika presiden mengangkat Sri Mulyono, Presiden masih memiliki kekuasaan dalam AURI, walaupun dalam batasan tertentu.

---

<sup>45</sup> ANRI. Arsip Pengumuman Presiden No.921 tentang susunan kabinet Dwikora yang disempurnakan.

<sup>46</sup> Dokumen Mabes AURI mengenai hasil rapat "Evaluasi tentang Fakta2 (26 Nop-3 Des 1965)". Dalam dokumen ini disebutkan penilaian negarif terhadap pengangkatan Sri Mulyono Herlambang sebagai Men/Pangau dan penugasan Omar Dani keluar negeri. Dilihat dari isinya besar kemungkinan dokumen ini adalah milik Angkatan Darat. Lihat Lampiran 15.

<sup>47</sup> Adapun perwira muda AURI yang memaksa Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Sukarno menggantikan Sri Mulyono Herlambang dipimpin oleh Komodor Suyitno Sukirno serta Letnan Kolonel Ibnu Soebroto.

Dalam pengangkatan Sri Mulyono Herlambang di Istana Negara, Presiden mengatakan alasannya sebagai berikut:

Saja terus terang mentjari orang jang mengerti kepada saja. Mengerti kepada Pemimpin Besar Revolusi, mengerti kepada Presiden, segala alam fikirannya sampai kepada ujung-ujung rambut alam fikiran daripada Presiden. Dia mengerti, harus mengerti, mengerti kepada isi perintah dan pimpinan daripada Panglima Tertinggi. Oleh karena itu, maka saja angkat Sri Mulyono Herlambang sebagai Panglima Angkatan Udara.<sup>48</sup>

Dikeluarkannya Supersemar yang ditafsirkan sebagai pemindahan kekuasaan (*Transfer of Authority*), mengakibatkan Presiden Sukarno tidak lagi memiliki kekuatan yang efektif dalam Angkatan Perang. Ia tidak berdaya ketika para menteri kesayangannya, seperti Omar Dani, Subandrio dan Jusuf Muda Dalam ditangkap oleh Letjen Soeharto. Men/Pangau Laksdya Sri Mulyono Herlambang, perwira yang Sukarno juga kemudian dituntut mundur dari jabatannya oleh sekelompok perwira AURI yang dipimpin Suyitno Sukirno, karena alasan menginginkan kepemimpinan figur yang lebih bersih. Padahal, ketika AURI dipimpin oleh Laksdya Sri Mulyono Herlambang, justru sikap AURI secara tegas menentang aksi G-30-S.<sup>49</sup>

Pada sebuah pertemuan internal AURI tanggal 18 Maret 1966, Men/Pangau Laksdya Sri Mulyono Herlambang diminta untuk mengundurkan diri. Secara formal

---

<sup>48</sup>Arsip No. 839 12/15/65 Naskah Pidato Presiden saat pelantikan Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang di Istana Negara. Lihat Lampiran 16.

<sup>49</sup> Imran Hasibuan Dkk, *Elang dan Pejuang Tanah Air: Biografi Marsekal (Purn) Roesmin Nurjadin*, (Jakarta: Q Communication dan Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal 147. Selanjutnya disebut Elang.

alasan yang dilontarkan dalam pengunduran dirinya yaitu untuk menjaga kekompakan AURI.<sup>50</sup> Dalam otobiografinya, Sri Mulyono Herlambang menuturkan:

Dengan pertimbangan Angkatan Darat makin sulit diajak kerjasama, saya akhirnya mengambil keputusan penting yang mengubah perjalanan sejarah kehidupan saya di AURI. Pada tanggal 23 Maret 1966, surat pengunduran diri ini saya ajukan kepada presiden melalui Laksamana Muda Makki Perdana kusumah.<sup>51</sup>

Ketika surat pengunduran diri Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang diantarkan Laksamana Makki Perdanakusumah, Komodor Andoko dan Komodor Kardono kepada Presiden Sukarno, Presiden tidak menjawab. Dengan demikian, walaupun secara *de facto*, Sri Mulyono Herlambang tidak lagi menjabat sebagai Men/Pangau, tetapi secara legal-formal Sri Mulyono masih menjabat sebagai Men/Pangau.

Beberapa hari kemudian, Dewan AURI memutuskan Deputy Operasi Roesmin Nurjadin untuk menjabat sebagai Ketua Dewan AURI.<sup>52</sup> Pada tanggal 28 Maret 1966, Roesmin mengundang perwira AURI dan mengadakan rapat di Halim untuk mengatasi kekosongan jabatan Men/Pangau.<sup>53</sup> Pada saat yang sama, Laksdya Sri

---

<sup>50</sup> *Berita Yudha*, 24 Maret 1966.

<sup>51</sup> Sri Mulyono Herlambang, *Op. Cit.*, hal 106

<sup>52</sup> Awal karier militer Roesmin Nuryadin dimulai sejak aktif di TRIP Brigade 17 Detasemen III (1947-1950), Pjs Dan Skuadron III Pemburu (1953-1955), Dan Skuadron III Pemburu (1955-1958), Pejabat Komandan Skuadron XI (1958-1962), Kastaf Kohanudnas (1962-1963), Kastaf Kohanud (1963-1964), Atase Udara KBRI Bangkok (1964-1965), Atase Udara KBRI Moskow (1965-1966) dan menduduki jabatan Men/Pangau menggantikan Sri Mulyono Herlambang Menteri Pangau sejak 1966 hingga 1970. Selepas bertugas di AURI, Rusmin dipercayai Presiden Soeharto menjadi Dubes RI untuk Inggris (1970-1974), Dubes RI untuk AS (1974-1978), Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978- 19 Maret 1983) dan Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 22 Maret 1988). Lebih lanjut Lihat biografi Roesmin, Imran Hasibuan, et al, *Elang dan Pejuang Tanah Air: Biografi Marsekal (Purn) Roesmin Nurjadin*, Jakarta: Q Communication dan Pustaka Sinar Harapan, 2004.

<sup>53</sup> Imran Hasibuan Dkk, *Op.Cit.*, Elang.....hal .149

Mulyono Herlambang juga mengadakan rapat di Mabes AURI Tanah Abang Bukit. Di tengah berlangsungnya rapat Halim, ketegangan pun memuncak dikubu Roesmin yang mendapatkan informasi bahwa Sri Mulyono mengadakan rapat di Tanah Abang Bukit. Akhirnya, Komodor Suyitno Sukirno mengambil gagasan agar Roesmin dan Leo segera menuju Mabes AURI, sementara ia sendiri meminta bantuan ke Kostrad. Agaknya rapat Tanah Abang Bukit, dicurigai Suyitno, Roesmin dan kawan kawan adalah untuk penggalangan kekuatan kubu Sri Mulyono Herlambang, yang akan mengambil alih kembali jabatan Men/Pangau.

Roesmin dan Leo langsung menuju ke Tanah Abang Bukit dan masuk ke ruang sidang yang dipimpin Sri Mulyono dan dihadiri 20 perwira tinggi AURI. Tak lama kemudian, terdengar suara enam buah panser Kostrad memasuki dan mengepung halaman Mabes AURI. Kedatangan panser Kostrad tersebut, karena dipanggil Komodor Suyitno.<sup>54</sup> Komandan Pasukan Gerak Tjepat AURI, Wiriadinata memerintahkan anak buahnya untuk tidak melayani panser Kostrad. Komodor Suyitno lalu masuk kedalam ruang sidang dan kemudian sempat mengajak Laksdya Sri Mulyono Herlambang berduel sambil mengeluarkan pistol. Ketegangan akhirnya mereda, ketika Komodor Andoko berhasil menenangkan Suyitno.

Tindakan Suyitno kemudian menuai kecaman internal AURI. Komodor Andoko menilai tindakan Suyitno dan kawan-kawan telah menyalahi aturan militer yang berlaku, karena pimpinan AURI masih dijabat Laksdya Sri Mulyono Herlambang. Omar Dani menilai peristiwa ini sebagai kudeta terhadap pucuk

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.150 ; Sri Mulyono Herlambang, *Op.Cit.*, hal. 107.

pimpinan AURI. Tindakan Suyitno yang mengandalkan kekerasan, justru menunjukkan sikap yang tidak demokratis dalam menyelesaikan masalah. Padahal, sebagai sesama perwira AURI terdapat forum musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Di samping itu, tindakan Komodor Suyitno tidak sesuai sapa marga dalam menghargai seorang atasan dan perwira yang berpangkat lebih tinggi.

Pada tanggal 31 Maret 1966, Sri Mulyono yang masih menjabat sebagai Men/Pangau berniat pergi ke Bandung untuk beristirahat.<sup>55</sup> Sebelum berangkat, ia sudah memberitahukan rencananya kepada Deputy Operasi Roesmin Nurjadin. Ketika melalui daerah industri Pulo Gadung, kendaraan yang ditumpangi Sri Mulyono dicegat pasukan Angkatan Darat. Kemudian ia dibawa ke Kodim Jatinegara dan dihadapkan dengan Komandan Kodim, Mayor CPM Koentjoro untuk dilaporkan kepada Komandan Kodam V Jaya, Amir Machmud. Akhirnya Sri Mulyono dibawa kembali kerumahnya di Iskandarsyah dan dijadikan tahanan rumah. Pengawal pribadinya langsung digantikan petugas CPM Angkatan Darat.

Ketika dalam posisi tahanan rumah, Sri Mulyono digantikan oleh Roesmin Nurjadin, perwira AURI yang menurutnya “lebih banyak mendengar kepada Kostrad

---

<sup>55</sup> Sri Mulyono Herlambang, *Ibid*, hal. 107. Menurut keterangan Dr. Saleh Djamhari, staf peneliti di Pusjarah TNI dan sejarawan militer UI, berdasarkan keterangan Gatot Suryadi, Komandan Batalyon Siliwangi yang menjadi saksi ketika Sri Mulyono ditangkap, kepergian Sri Mulyono bukan untuk beristirahat melainkan untuk melarikan diri. Ciri-ciri melarikan diri tampak, karena saat ditangkap Sri Mulyono menggunakan seragam prajurit berpangkat sersan, padahal pangkatnya adalah Laksamana Madya. Namun, keterangan ini tidak di dasarkan catatan lain. Terlepas dari bagaimana kondisi Sri Mulyono saat di tangkap, kepergiannya merupakan suatu yang tidak wajar. Seorang pemimpin militer, AURI, tidak sepatutnya beristirahat ketika insitusinya dibutuhkan dalam membantu mengamankan kondisi negara yang kacau pasca G-30-S.

daripada ke AURI”.<sup>56</sup> Pada tanggal 8 April, sehari sesudah pengangkatan Roesmin sebagai Men/Pangau, Sri Mulyono dipindahkan ke Mess CPM di Jalan Darmawangsa, Kebayoran Baru, hingga kemudian dipindahkan lagi ke Nirbaya<sup>57</sup>.

## 5.6. Menguatnya Pengaruh Angkatan Darat dalam AURI

Sebenarnya campur-tangan Angkatan Darat terhadap AURI telah dilakukan jauh-jauh hari, yakni menjelang berakhirnya kepemimpinan Omar Dani. Sri Bima Ariotedjo menuturkan apa yang dialaminya sepulang dari Moskow pada tanggal 7 Oktober 1965 sebagai berikut:

Waktu kami berkumpul di Jalan Setiabudi, waktu itu malam-malam, ada intruksi dari Kostrad bahwa semua orang yang baru pulang dari luar negeri diminta kumpul di Kostrad untuk dikasih *briefing* oleh Mayjend Soeharto. Memang aneh, waktu itu angkatan satu sama lain tidak ada hubungan kerjasama, satu lebih tinggi lalu memerintahkan yang lain. Kami diminta datang, mesti ada yang aneh dan luar biasa. Akhirnya kami penuhi permintaan itu. Kami rombongan kurang lebih tujuh puluh orang berkumpul di Kostrad.

Disana mulai ada kejadian aneh. Sebelum masuk pintu saya lihat Letkol Urip Widodo, tetapi terlihat canggung. Padahal keduanya sudah mengenal. Kami di dalam menunggu satu setengah jam sebelum Mayjend Soeharto datang. Disitu beliau kasih *briefing* bahwa pimpinan saudara berada seolah-olah dipihak sana, ini yang terjadi pada tanggal sekian. Akhirnya saya disuruh memilih, ikut pimpinan saudara atau ikut kami. kami yang justru tidak mengetahui persis apa yang terjadi, masih sempat menjawab secara lugu, secara militer, bahwa “maafkan, saya ini berangkat atas perintah menteri panglima angkatan udara,

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang pada 27-05-2004.

<sup>57</sup> Nirbaya sering diistilahkan sebagai kepanjangan dari interniran berbahaya. Letak tahanan rumah ini adalah daerah Pondok Gede, setelah terminal bis Pinang Ranti sebelum Asrama Haji. Tahanan rumah ini merupakan tahanan yang digunakan untuk musuh politik Orde-Baru, seperti kemudian Mochtar Lubis (wartawan) dan Dr. Sjahrir (aktivis Malari). Kisah detail Nirbaya lihat Mochtar Lubis, *Nirbaya, Catatan Harian Mochtar Lubis dalam Penjara Orde Baru*, (Jakarta: LSPP & Yayasan Obor Indonesia, 2008)

saya pulang saya harus lapor sama yang memerintahkan saya itu dan setelah itulah kami baru lapor pada pak Harto”. Lalu kami pulang.<sup>58</sup>

Dari kesaksian Si Bima dapat ditarik kesimpulan, bahwa Soeharto berusaha mengambil alih kepemimpinan para perwira yang baru pulang dari luar-negeri, melampaui garis hirarkis masing-masing institusinya. Sri Bima sebagai perwira AURI diharapkan tidak mengikuti intruksi Men/Pangau Omar Dani, karena panglimanya terlibat dalam G-30-S. Lebih lanjut ia diharapkan mengikuti garis koordinasi yang baru, di bawah komando Mayjen Soeharto. Dengan demikian, Soeharto telah bertindak agar seorang bawahan membangkang terhadap atasannya.

Ketika AURI dipimpin Men/Pangau Mulyono Herlambang, campur tangan Angkatan Darat dalam menyingkirkan kelompok Sukarno dalam tubuh AURI semakin terlihat. Dalam insiden Tanah Abang Bukit, Kostrad secara terbuka membantu kelompok Suyitno dengan mengirimkan enam buah pansernya untuk mengepung Mabes AURI yang saat itu digunakan rapat oleh Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang.

Pengangkatan Komodor Roesmin Nurjadin untuk menduduki jabatan Men/Pangau, juga tidak berdasarkan permintaan dan pertimbangan Presiden Sukarno. Pengangkatan tersebut lebih disebabkan oleh permintaan hasil rapat Dewan AURI yang didominasi kelompok perwira Pro-Angkatan Darat. Bahkan, ketika Roesmin diangkat, Sri Mulyono justru sedang dijadikan tahanan rumah oleh CPM Angkatan

---

<sup>58</sup> ANRI. Sumber sejarah lisan Sri Bimo Ariotedjo (Seskau 1965-Daoops I Operasi AU 1966) dengan wawancara Drs. Moh. Aris pada November 1990, kaset V B dan VI A.

Darat. Sangat wajar jika dalam kesempatan upacara pelantikan Roesmin Nurjadin di Istana Negara 7 April 1966, isi pidato Sukarno lebih menunjukkan ketidaklaziman alasan pengangkatan Men/Pangau.

“ I am still president, still supreme commanders of the Armed forces, still mandatory of supreme congress, still prime minister, still leader of Indonesian revolution.....maka didalam kualitas itulah saja melantik saudara Roosmin Nurjadin sebagai Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia.”<sup>59</sup>

Kata-kata “I am still president” lebih merupakan upaya Presiden Sukarno untuk menjelaskan bahwa pengangkatan dilakukan hanya sebatas keabsahan kapasitasnya sebagai presiden. Presiden Sukarno tidak memiliki alasan lain, baik yang bersifat profesionalitas, loyalitas atau ideologis dalam pengangkatan Roesmin Nurjadin. Apabila dibandingkan dengan pidato presiden saat pengangkatan Sri Mulyono Herlambang, perbedaan itu akan sangat tampak, karena pada saat itu presiden mendasarkan pilihannya didasarkan kepada orang yang mengerti alam pikiran presiden. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pengangkatan Roesmin tidak atas dasar pertimbangan dan keinginan pribadi, tetapi atas dasar keterpaksaan.

Walaupun kemudian kebijakan Men/Pangau Roesmin Nurjadin tidak berbeda jauh dari kebijakan Sri Mulyono Herlambang. Namun pada sisi yang lain, kebijakan Roesmin lebih menunjukkan sikapnya dalam mendukung AD. Hal ini tampak dari adanya intruksi untuk mencabut hak khusus para pendahulunya, Omar Dani dan

---

<sup>59</sup> Arsip No. 876 04/07/66. Naskah Pidato Presiden saat Pelantikan Men/Pangau yang baru Roosmin Nurjadin di Istana Negara. Periksa juga, Budi Setiyono dan Bonnie Triyana (ed), *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara jilid II*, (Semarang: Messias, 2003), hal. 81.

Suryadarma.<sup>60</sup> Kebijakan yang ditempuh oleh Men/Pangau Roesmin Nurjadin juga cenderung menguntungkan kampanye politik AD menuju kekuasaan, karena sifatnya yang netral terhadap kekuasaan Presiden Sukarno. AURI yang Sukarno is merupakan batu sandungan Angkatan Darat, karena itu di bawah kepemimpinan Roesmin diharapkan dapat bersikap netral atau mendukung peralihan kekuasaan yang baru.

Figur Roesmin sendiri memang dikenal memiliki hubungan yang kurang baik dengan Omar Dani. Dalam memoar Omar Dani disebutkan, ketika diadakan seminar pertama AURI di Cibulan pada Januari 1963, ada dua perwira yang memakai kacamata gelap dan acuh tak acuh ketika ia berpidato mengenai Nasakom. Padahal ketika itu, tidak ada perwira lain yang memakainya. Perwira tersebut adalah Kolonel Roesmin dan Kolonel Suyitno Sukirno.<sup>61</sup> Roesmin juga pernah menghadap Omar Dani dan menyampaikan kritiknya terhadap ketidakmampuan kinerja staf departemen AURI.<sup>62</sup>

Selain hal diatas, Roesmin dikenal memiliki hubungan erat dengan Angkatan Darat.<sup>63</sup> Roesmin memiliki kontak pribadi dengan Nasution, bahkan Roesmin pernah diajak dalam sebuah misi keluar negeri. Dalam memoar M. Jassin disebutkan bahwa Nasution adalah orang yang merencanakan agar Roesmin menduduki jabatan

---

<sup>60</sup> Lihat Lampiran 17

<sup>61</sup> Benedicta A. Surodjo dan JMV Soeparno, *Op.Cit.*, hal. 105

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> A.H Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Orde Baru*, (Jakarta:Gunung Agung, 1987), hal. 361, 362 dan 397; Tim Pusat Data dan Analisa Tempo, *Jenderal Tanpa Pasukan-Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H Nasution*, (Jakarta: PDAT & ISAI, 1998), hal 169. Menurut Nasution, pasca G-30-S, kontak pribadi dengan Roesmin terjadi secara langsung. Di samping Roesmin, perwira lainnya yang sering dikontak antara lain: Suyitno Sukirno, Saleh Basarah dan Ashadi Tjahyadi. Perwira-perwira inilah yang kelak menduduki jabatan Men/Pangau dan jabatan penting lain pada masa Rezim Soeharto.

Men/Pangau menggantikan para seniornya.<sup>64</sup> Dengan Soeharto, Roesmin sudah saling mengenal sejak sama-sama bergerilya di Jawa-Tengah.<sup>65</sup> Dengan demikian, penunjukan Roesmin sebagai Men/Pangau, tentunya tidak dapat dilepaskan dari Supersemar yang menaikkan otoritas Letjen Soeharto terhadap Sukarno dalam pemerintahan. Soeharto memerlukan panglima angkatan yang memberikan dukungan kepadanya untuk merebut kekuasaan Sukarno.

Dengan demikian, implikasi utama yang dilahirkan pasca perubahan ini ialah berkurangnya pengaruh AURI sebagai salah satu kekuatan politik nasional. Jika pada masa sebelumnya, AURI secara otonom adalah angkatan yang secara politis mendukung kebijakan Presiden Sukarno, maka pasca Supersemar AURI tidak lagi dapat bertindak secara otonom. Di sisi lain, berkurangnya pengaruh Presiden Sukarno menunjukkan keberhasilan para pemimpin AURI mengikuti proses suksesi kekuasaan secara damai. Sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara, di bawah komando panglimanya yang Sukarnois, AURI menjadi kekuatan penting untuk mempertahankan suatu kekuasaan negara. Bukan sesuatu yang mustahil, apabila AURI bertindak membela Presiden Sukarno dengan kekuatan bersenjata, maka akan menimbulkan perang saudara sesama angkatan bersenjata. Namun, AURI lebih memilih mempraktikkan doktrin *Swa Bhwana Phaksa* dengan memilih keutuhan AURI, ABRI dan NKRI.

---

<sup>64</sup> M. Jassin, *Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Soeharto*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal 58.

<sup>65</sup> Imran Hasibuan Dkk, *Op.Cit.*, Elang... hal 156.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku, Artikel dan Karya Ilmiah lainnya

- Anderson, Benedict R. and Ruth T. Mc Vey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*, Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University Press, 1971.
- Anwar, Rosihan. et al., *Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996
- Boediardjo. *Siapa Sudi Saya Dongengi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Dake, Antonie. *In the Spirit of the Red Banteng*, Mouton: The Hague, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Sukarno File: Kronologi Suatu Keruntuhan*, Jakarta: Aksara Karunia, 2006
- Dinas Sejarah TNI-AU. *Sejarah Operasi Penerbangan Indonesia periode 1945-1950*, Jakarta: Mabes TNI-AU 1980.
- Dinas Penerangan TNI-AU. *Perjalanan TNI Angkatan Udara dan Pengembangannya pada awal dasawarsa 80-an*, Jakarta: Mabes TNI-AU, 1982.
- Djajengminardo, Wisnu. *Kesaksian: Memoir Seorang Kelana Angkasa*, Bandung: Angkasa, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Feith, Herberth dan Lance Castles (ed). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1966*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Gardner, Paul. F. *50 Tahun Amerika Serikat-Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, Penj.Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986.

- Green, Marshall. *Dari Sukarno ke Soeharto: G-30-S/PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 1995.
- Hanafi, A.M. *AM Hanafi Menggugat: Kudeta Jend. Soeharto dari Gestapu ke Supersemar*, Paris: Edition Montblanc Life-France, 1998.
- Hasibuan, Imran Dkk, *Loyalitas Tanpa Pamrih: Biografi Marsekal (Purn) Ashadi Tjahjadi*, Jakarta: Q Communication dan Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Elang dan Pejuang Tanah Air: Biografi Marsekal (Purn) Roesmin Nurjadin*, Jakarta: Q Communication dan Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Herlambang, Sri Mulyono. *Pengabdianku: Hanya untukmu Negara dan Bangsa*. Jakarta: RA Media Specialist, 2000.
- Hindley, Donald, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.
- Holtzappel, Coen. *The 30 September Movement: A Political Movement of the Armed Forces or an Intelligence Operation?*, *Journal of Contemporary Asia*, 9 (2), 1979, hal. 216-239.
- Hughes, John. *Indonesian Upheaval, A Report of A Coup that Misfired A Titan Who Fell*. New York: Student Edition, 1967.
- \_\_\_\_\_. *The End of Sukarno, A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, London: Angus & Robertson, 1967.
- Jassin, M, *Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Soeharto*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Johnson, David. T, *Gestapu: The CIA'S "Track Two" in Indonesia*, [djohnson@cdi.org](mailto:djohnson@cdi.org), original version, 1976.
- Kahin, Audrey dan George Mc. Turnan Kahin. *Subversi Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2000.
- Karni, Rahadi. S (ed). *The Devious Dalang: Soekarno and the So-called Untung-Putsch Eye-Witnes report by Bambang S. Widjanarko*, tt: The Hague, 1974.

- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Katoppo, Aristides, et. al. *Menyingkap Kabut Halim 1965*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Kroef, Justus. M. Van Der. *Indonesia Since Soekarno*, Singapore: Asia Pasific Press, 1971.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- \_\_\_\_\_ *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
- Legge, J.D. *Sukarno, Biografi Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Leirissa, R.Z. *PRRI/Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 1991
- Lubis, Mochtar. *Nirbaya, Catatan Harian Mochtar Lubis dalam Penjara Orde Baru*, Jakarta: LSPP & Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Mortimer, Rex. *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideologi and Politics 1959-1965*, London: Cornell University Press, 1974.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 1995.
- Nasution, A.H, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 4: Masa Pancaroba Ke-dua*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- \_\_\_\_\_ *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Orde Baru*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh. *Tragedi Nasional Percobaan G-30-S/PKI di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1993.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusunto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Pusjarah TNI. *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949) Jilid II (1950-1959) Jilid III (1959-1965)*, Jakarta: Markas Besar TNI, 2000.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2005

- Roeder. O.G. *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Roosa, John. *Dalih Pembunuhan Masal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: Hasta Mitra, 2008-07-09
- Saelan, H. Maulwi. *Dari Revolusi '45 sampai Kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa*, Jakarta: Yayasan Hak Bangsa, 2001
- Sembiring, Garda dan Harsutedjo, *Gerakan 30 September 1965: Kesaksian Letkol (Penerbang) Heru Atmodjo*, Jakarta: ISAI, PCE dan Hasta Mitra, 2004.
- Scott, Peter Dale. *Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno*. Tanpa Tahun
- Sekretariat Negara R.I. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*, Sekretariat Negara R.I: Jakarta, 1994
- Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana (ed). *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30-September 1965-Pelengkap Nawaksara jilid I dan II*, Semarang: Messias, 2003
- Sutrisno. *Marsekal TNI Suryadi Suryadarma*, Jakarta: Departemen P&K, 1985
- Soeharto. *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti yang dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan KH*, Jakarta: Cipta Lamtoro Gung Persada, 1989
- Soekarno, Ir. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, Jakarta: Panitia Penerbitan DBR, 1963
- Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, Jakarta: LP3ES, 1988
- Surodjo, Benedicta A. dan JMV Soeparno, *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku,: Pledoi Omar Dani*. Jakarta: ISAI, 1999.
- Tim Pusat Data dan Analisa Tempo. *Jenderal Tanpa Pasukan-Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H Nasution*, Jakarta: PDAT & ISAI, 1998
- Wertheim, W.F. *Suharto and the Untung Coup-the Missink Link*, Journal of Contemporary Asia, Vol 1 no.2, Winter 1970
- Wieringa, Saskia. E. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra, 1999

## **B. Laporan, Dokumen dan Sumber Mahmilub**

*Laporan Komando Tertinggi (KOTI) antara 1964-1966.*

*Laporan Koopkamtib 1965-1967*

*G-30-S Dihadapan Mahmillub (PERKARA UNTUNG), Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.*

*G-30-S Dihadapan Mahmillub (PERKARA NYONO), Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.*

*G-30-S Dihadapan Mahmillub (PERKARA Dr. SUBANDRIO), Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966.*

*Markas Besar TNI Angkatan Udara, Dokumen Sekilas Peristiwa G-30-S/PKI dan Penumpasannya (Penerbitan Sementara), 1972.*

## **C. Surat Keputusan dan Naskah Pidato**

Naskah Pidato Presiden Dalam acara pelantikan Brigjend polisi Sutjipto Judodihardjo menjadi Men/Pangak dan Laksamana Udara Haji Sri Mulyono Herlambang menjadi menteri diperbantukan presiden 1965

Naskah Pidato Presiden saat pelantikan Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang di Istana Negara 1965.

Naskah Pidato Presiden saat pelantikan Men/Pangau yang baru Roosmin Nurjadin di Istana Negara 1966.

Surat Keputusan Presiden RI tentang Susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Merdeka Jakarta.

Surat Keputusan Presiden RI tentang Susunan kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi di Istana Merdeka Jakarta.

Surat Keputusan, Intruksi Men/Pangau serta Surat Kebijakan lainnya masa Omar Dhani (1964-1965)

Surat Keputusan, Intruksi Men/Pangau serta Surat Kebijakan lainnya masa Sri Mulyono Herlambang (1965-1966)

Surat Keputusan, Intruksi Men/Pangau serta Surat Kebijakan lainnya masa Roesmin Nurjadin (1966)

#### **E. Nota Dinas**

*Doktrin AURI, Swa Bhwana Phaksa.* Markas Besar AURI, tanpa tahun

Penerbitan Khusus 424, *Djangan Sekali-kali Meninggalkan Sedjarah*, Dinas Penerangan R.I: 1966.

#### **F. Sumber Lisan**

Arsip sumber lisan wawancara Sri Bimo Ariotedjo, Moh.Aris, Kaset V B dan VI A, 1990.

Film Dokumenter *Bunga Rampai Pidato Bung Karno 1942-1967* Arsip Nasional R.I.

Wawancara peneliti dengan Ibu Supeni, tokoh PNI di Jakarta pada tanggal 06-03-2004.

Wawancara peneliti dengan Laksamana Sri Mulyono Herlambang, Men/Pangau pada 1965-1966 pada tanggal 17-04-2003, 22-06-2003, 27-05-2004

Wawancara peneliti dengan Letkol. Heru Atmodjo, Assisten Direktur Intelejen AURI 1965 dan Wakil Ketua Dewan Revolusi dalam G-30-S, pada tanggal 09-06-2004 dan 06-08-2007.

#### **G. Majalah dan Surat Kabar**

*Angkasa:* No.4 Tahun ke XV April 1965, No.6 Tahun XV Djuni 1965, No.11 Tahun XV November 1965

*Berita Yudha:* 5 Maret 1966, 11 Maret 1966, 24 Maret 1966

*Kompas* 6 Juli 1965, 12 Oktober 1965, 18 Oktober 1965, 23 Oktober 1965, 26 Oktober 1965, 2 Nopember 1965, 15 November 1965, 22 November 1965

*Pikiran Rakjat,* 7 Oktober 1965

## RIWAYAT HIDUP

Humaidi. Lahir di Jakarta pada 1402 H. Masa studinya dilalui di SDN 05 Duri Kosambi (1987-1993), SLTPN 176 Jakarta-Barat (1993-1996), SMUN 84 Jakarta (1996-1999) dan Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Jakarta (1999-2005). Selain menempuh pendidikan formal, ia *mengaji* di Pondok Pesantren Al-Itqan Jakarta-Barat.

Semasa SMU, pernah menjadi pengurus Rohani Islam (Rohis) SMUN 84 Jakarta, pengurus Papkor (Putra-Putri Korpri) Jakarta-Barat, pengurus Ikatan Remaja Masjid Ad-Da'wah Cengkareng Jak-Bar serta ikut berpartisipasi dalam pemantauan PEMILU 1999 bersama Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta-Barat. Saat menempuh pendidikan di UNJ, aktif dalam lembaga internal organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Sejarah FIS-UNJ sebagai Ketua Lembaga Kontrol (2000-2001), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) FIS-UNJ sebagai staf Departemen hubungan kemasyarakatan (2001-2002), Keluarga Mahasiswa (KM) UNJ sebagai staf advokasi, Lembaga Pers Mahasiswa UNJ Didaktika sebagai reporter dan biro advokasi (2000-2003). Dalam organisasi ekstra, aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai Ketua Komisariat UNJ (2002-2003), Ketua I Cabang PMII Jakarta-Timur (2003-2005), staf kajian Koordinator Cabang PMII DKI Jakarta (2006-2008) dan staf Lembaga Kajian dan Pengembangan Pemikiran Pengurus Besar PMII (2008-2010).

Prestasi yang pernah dicapai antara lain: Lolos 10 besar Lomba Karya Tulis Mahasiswa 2000-2001 dengan judul “Raport Afektif dalam proses evaluasi pembelajaran (team)”, penerima *Scholarship* dan *Outstanding Student* Exxon Mobil Oil Indonesia 2002-2003 dan wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan judicium *Cum Laude*. Selama masa studi di Program Pascasarjana Departemen Sejarah FIB Universitas Indonesia, mendapatkan bantuan dari Sasakawa-Tokyo Foundation.

Saat ini aktivitasnya adalah sebagai staf pengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 47 Jakarta dan asistensi dosen di Jurusan Sejarah Universitas Negeri Jakarta.



## BAB V

### KESIMPULAN

Perkembangan AURI dalam konteks politik Indonesia antara tahun 1962 hingga 1966 merupakan suatu gerak yang tragis. Sejak pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan reorganisasi militer pada tahun 1962, AURI merupakan kekuatan yang menjadi pendukung utama Presiden Sukarno dikalangan angkatan bersenjata. Hal ini tidaklah menjadi suatu keanehan, mengingat kedudukan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata serta kharisma presiden yang demikian kuat sebagai bapak pendiri bangsa Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sulit untuk membayangkan Indonesia tanpa figur Sukarno.

Perkembangan politik nasional yang diarahkan Presiden Sukarno menuju suatu bentuk persekutuan nasionalis-agama-komunis (Nasakom) serta keinginan presiden mengakomodasi kekuatan komunis dalam pemerintahan, mengalami tantangan hebat dari Angkatan Darat. Sukarno yang melihat adanya loyalitas yang kuat dari AURI bagi dirinya, sebagai panglima tertinggi tentu mengetahui adanya hubungan yang kurang baik antara Kepala Staf AURI Komodor Suryadarma dengan KSAD (kemudian Menhankam) Jenderal AH.Nasution. Dengan memanfaatkan faktor tersebut, presiden tidak perlu berhadapan dengan AD secara terbuka karena masih memiliki sekutu tanpa syarat yakni KSAU Suryadarma.

Namun, Peristiwa Aru yang menenggelamkan *KRI Macan Tutul* dan menewaskan Deputy ALRI Komodor Yos Sudarso melahirkan kecaman terhadap kepemimpinan Suryadarma yang dianggap tidak mampu mengatur perlindungan